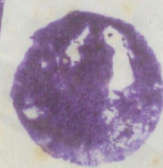


**PENGARUH KREDIT PERBANKAN DAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
TAHUN 1988.I – 2003.IV**

SKRIPSI



**Unit Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Waktu Pembelian: 25 JAN 2004
No. Induk: P
Klasifikasi: 338.9578
Kelas: PUR
P

Oleh :

HERI PURWANTO
NIM : 000810101344

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2004**

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH KREDIT PERBANKAN DAN PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI INDONESIA TAHUN 1988.I - 2003.IV

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : HERI PURWANTO

N. I. M. : 000810101344

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

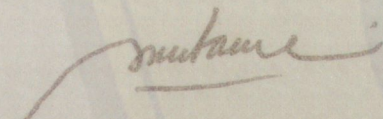
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

18 OKTOBER 2004

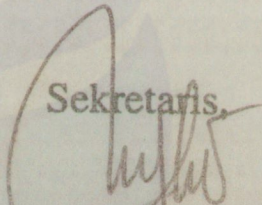
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

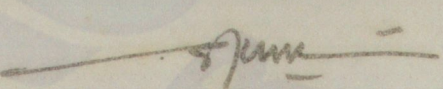
Ketua,


Dra. Sri Utami, SU
NIP. 130 610 496

Sekretaris,

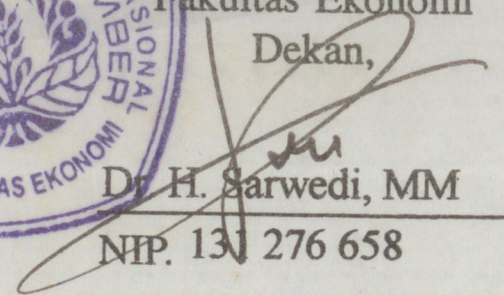

Dra. Anifatul Hanim
NIP. 131 953 240

Anggota,


Drs. Badjuri, ME
NIP. 131 386 652



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,


Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Kredit Perbankan Dan Penanaman Modal Dalam
Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
Tahun 1988.I – 2003.IV

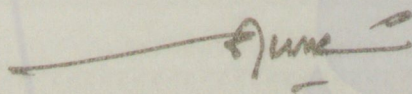
Nama Mahasiswa : Heri Purwanto

NIM : 000810101344

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Moneter

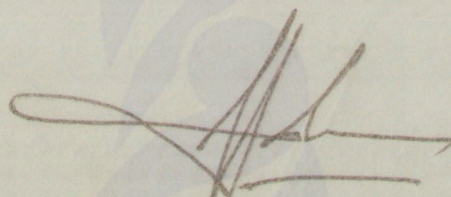
Pembimbing I



Drs. Badjuri, ME

Nip. 131 386 652

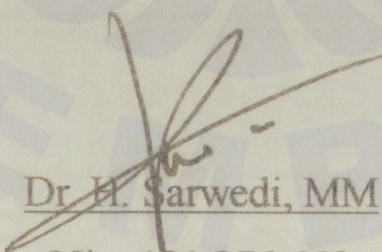
Pembimbing II



Drs. M. Adenan, MM

Nip. 131 996 155

Ketua Jurusan



Dr. H. Sarwedi, MM

Nip. 131 276 658

Tanggal Persetujuan : Oktober 2004

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Bapak dan Ibu yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, do'a, nasehat serta bimbingan dalam setiap perjalanan hidupku.
- ❖ Kakak-kakakku, Budi Hermanto, Erma, Nur Ali dan Siti Subaida atas do'a dan motivasinya.
- ❖ Almamater yang kubanggakan.

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu”

(QS. Al Baqoroh : 45)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). Dan hanya kepada KU-lah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insyiroh: 5-8)

“Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada singgahsana Tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa”

(Kahlil Gibran)

“Selalu ada celah dalam setiap masalah, selalu ada jalan dalam setiap hambatan, optimis dan berusaha adalah kunci utamanya.”

(My Self)

ABSTRAKSI

PENGARUH KREDIT PERBANKAN DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1988.I – 2003.IV.

Oleh :
Heri Purwanto

Pembangunan ekonomi memerlukan modal dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materiil harus muncul dari warga negara itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1988.I-2003.IV. Penelitian ini menggunakan alat analisis OLS Klasik Regresi Linier Berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder time series kuartalan mulai tahun 1988 hingga 2003, yang diperoleh dari Bank Indonesia Cabang Jember dan Badan Pusat Statistik Cabang Jember.

Pada tingkat keyakinan 95 %, hasil estimasi OLS Klasik Analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan variabel kredit perbankan (X1) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan nilai koefisien $-4,503$. Sedangkan variabel penanaman modal dalam negeri (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan nilai koefisien $2,115$. Hasil uji F menunjukkan bahwa kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1988.I-2003.IV. Model regresi dalam penelitian ini lolos uji asumsi klasik multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

Kredit perbankan yang memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi memerlukan kebijakan yang tepat dari perbankan dalam pemberian kredit. Pihak perbankan dalam memberikan kredit harus selektif dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran dana pembangunan dan kredit macet. Di samping itu, Pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, sehingga memungkinkan perkembangan realisasi investasi khususnya investasi dalam negeri.

Kata kunci : *Kredit Perbankan, Penanaman Modal Dalam Dalam Negeri, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Model OLS Klasik.*

KATA PENGANTAR

Tiada untaian kata yang lebih indah dan agung yang dapat penulis ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk dan ridhonya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kredit Perbankan Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1988.I-2003.IV”**.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka selayaknyalah jika penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Badjuri, ME selaku pembimbing I dan Bapak Drs. M. Adenan, MM selaku pembimbing II atas waktu, pengarahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sarwedi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, beserta seluruh jajarannya atas transformasi ilmunya, dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas segala bantuan dan dukungannya .
3. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Pusat Universitas Jember dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas segala bantuan informasi yang diberikan pada penulis.
4. Pimpinan dan semua staf Bank Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan bantuan informasi yang diperlukan oleh penulis.
5. Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan yang terbaik buat penulis.
6. Kakak-kakakku yang kusayangi, Mas Budi, Mbak Erma, Mas Ali dan Mbak Ida atas kehangatan kasih sayang selama ini serta keponakanku Difa atas keceriaannya.
7. Sahabat-sahabat sejatiku yang kusayangi : Hari Suyatno, M. Khodim, RB. Edo Sardjito yang senantiasa memberikan keceriaan dan dorongan semangat pada penulis serta atas kebersamaan dan persahabatannya selama ini, semoga persahabatan kita abadi.

8. Teman-teman dan sahabatku : Rian (semangat terus dan cepet ujian), Aris S, Anita, Gita, Nia, Kiat, , Neni, Dwi, Donna, dan Panca serta teman-teman IESP angkatan 2000 yang lainnya atas segala kebersamaan kita selama ini.
9. Teman-temanku : Edi supriadi, Rudi, Eko & Endah (moga rukun terus), atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan hasil penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulisan karya ilmiah yang sejenis di masa mendatang.

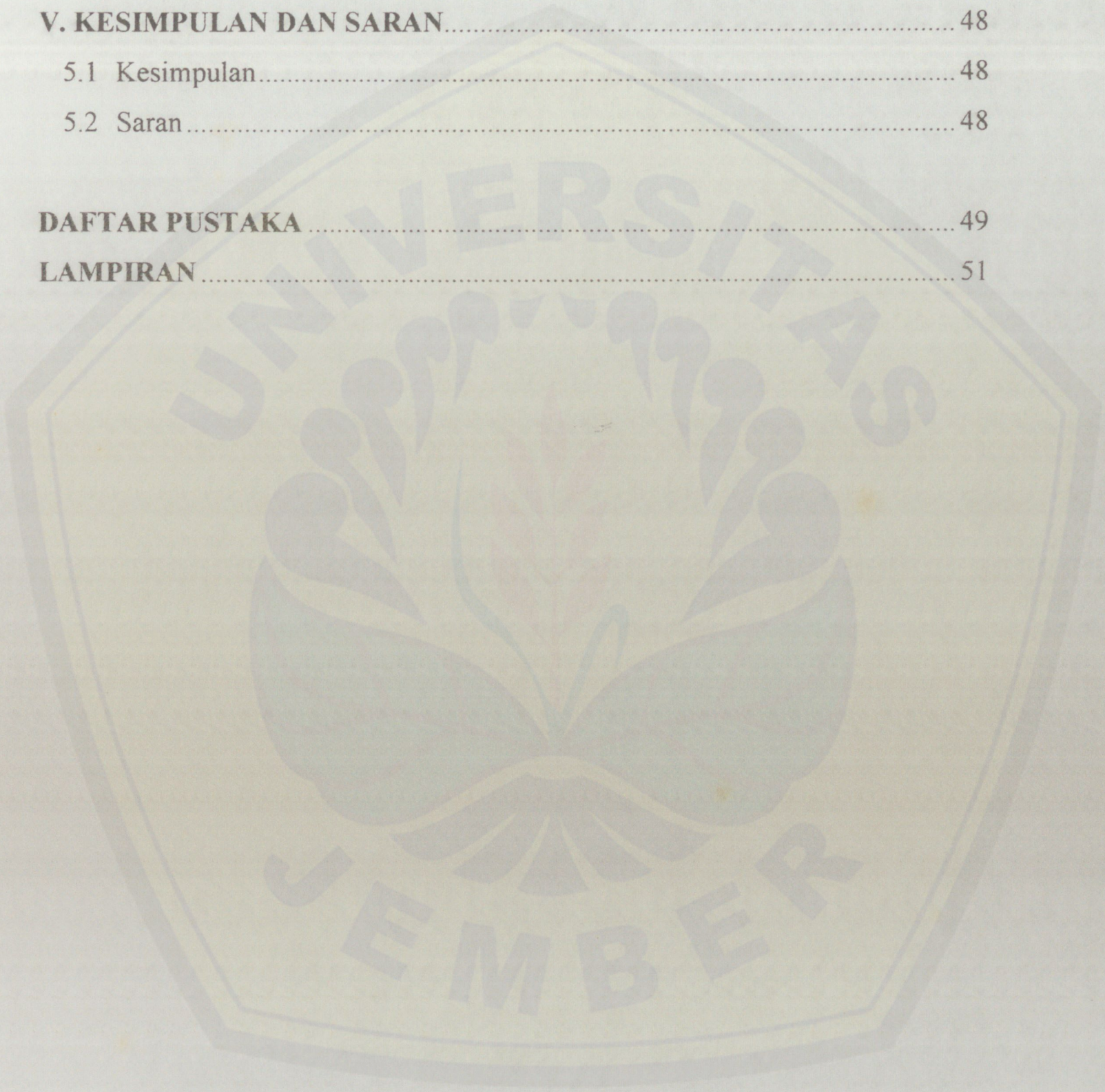
Jember, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

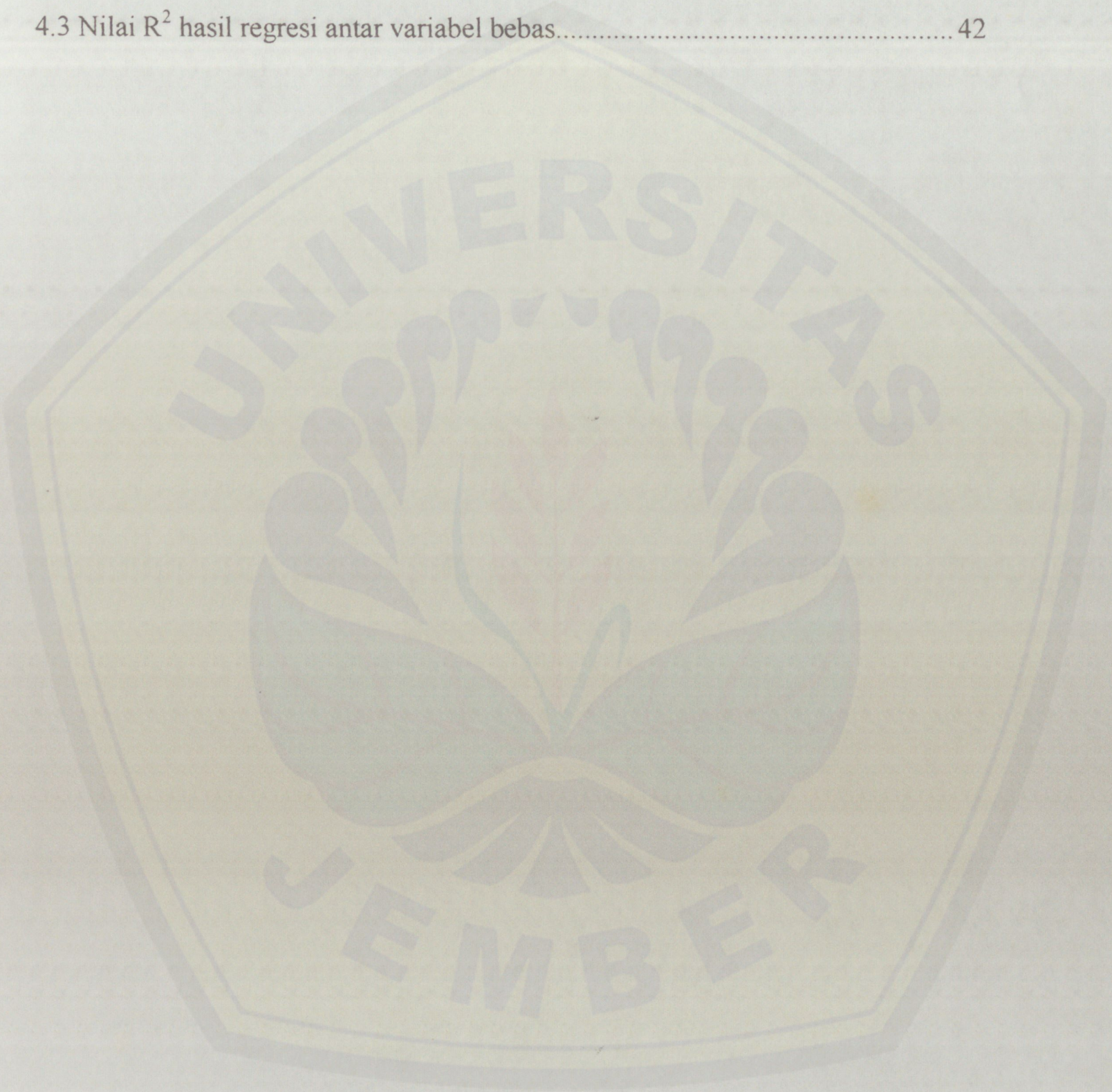
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	5
2.2 Landasan Teori	5
2.3 Hipotesis	22
III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Rancangan Penelitian	23
3.2 Prosedur Pengumpulan Data	23
3.3 Metode Analisis Data	24
3.4 Definisi Variabel Operasional	28

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum	30
4.2 Analisis Data.....	39
4.3 Pembahasan	43
V. KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51



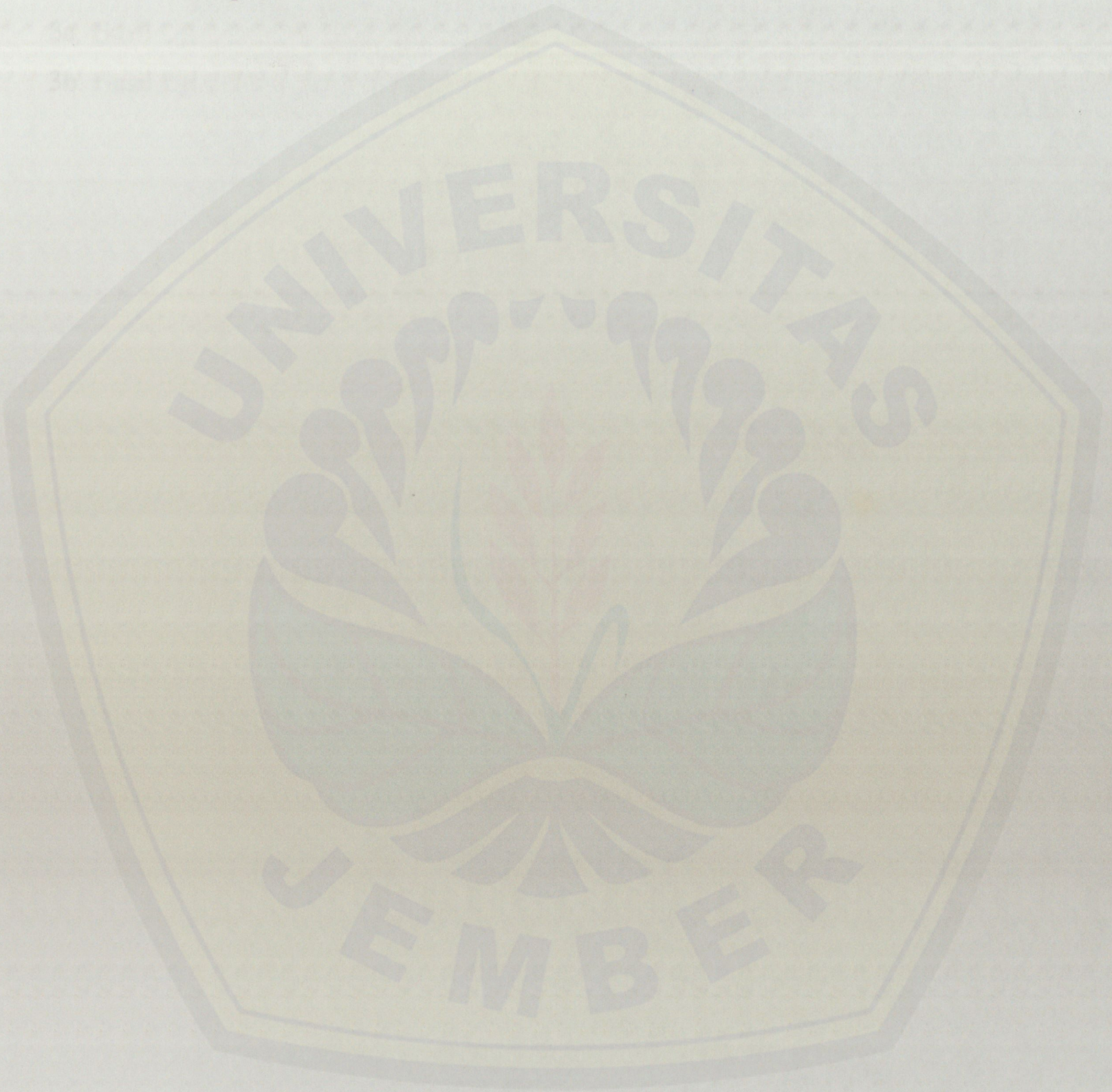
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1988-2003	32
4.2 Perkembangan PMDN dan PMA tahun 1988-2003	36
4.3 Nilai R^2 hasil regresi antar variabel bebas.....	42



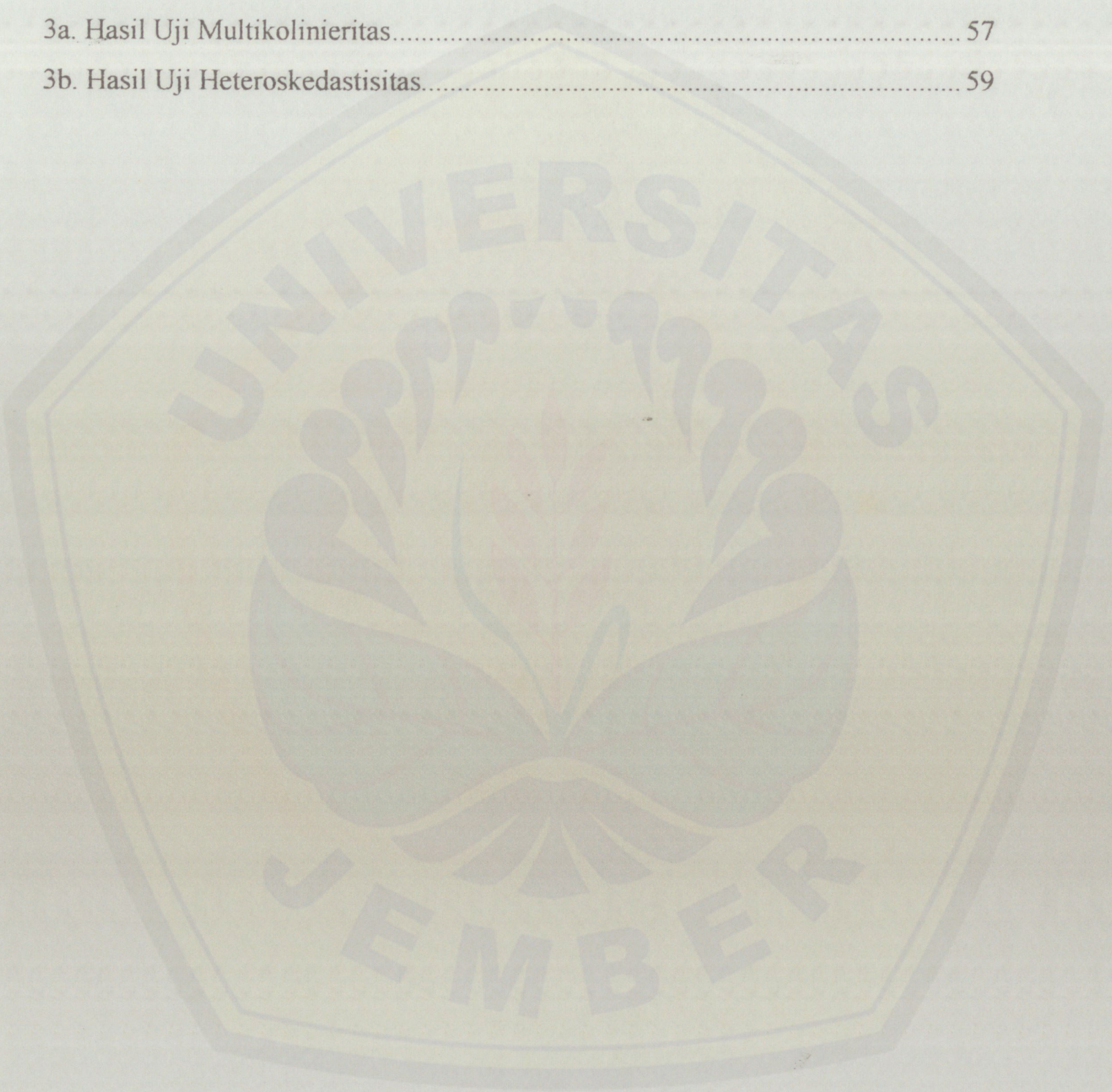
DAFTAR GAMBAR

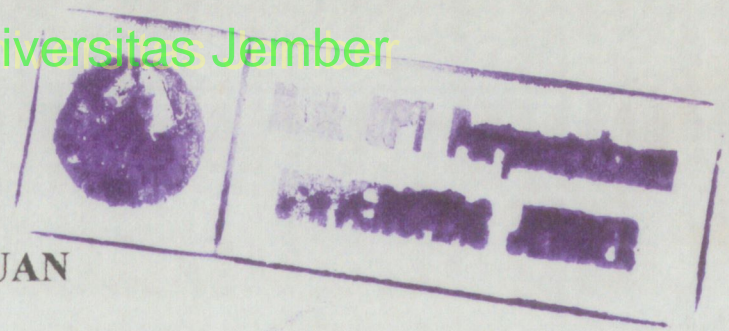
Gambar	Halaman
2.1 Fungsi Produksi Harrod-Domar	12
2.2 Proses Multiplier	21



DAFTAR LAMPIRAN

1a. Data Base.....	51
1b. Data Diestimasi	53
2. Hasil Estimasi Regresi.....	55
3a. Hasil Uji Multikolinieritas.....	57
3b. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Proses pembangunan ekonomi khususnya pembangunan nasional akan bisa berjalan secara efisien jika memenuhi syarat-syarat yaitu : (1) pembangunan ekonomi mampu memproduksi output nasional sesuai dengan preferensi sosial yang ada secara optimal dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, (2) terciptanya tingkat yang optimal dalam produksi barang dan jasa yang mencerminkan distribusi pendapatan yang ada, (3) pembangunan ekonomi dilandasi oleh kondisi-kondisi yang kokoh untuk melakukan ekspansi yang optimal pada masa-masa yang akan datang. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat diperlukan adanya pertumbuhan yang positif dan terus menerus dalam pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan yang tinggi dicapai melalui peningkatan produksi di berbagai sektor pembangunan ekonomi serta stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999 : 13).

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materiil harus muncul dari warga negara itu sendiri. Pembangunan

harus diprakarsai oleh negara dan tak dapat dicangkokkan dari luar. Kekuatan luar seyogyanya merangsang dan membantu kekuatan nasional (Jhingan, 2003 : 41)

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan penyediaan dan pengalokasian sumber-sumber produksi untuk ditujukan pada proses produksi barang-barang modal yang tidak dipakai untuk konsumsi langsung, tetapi akan digunakan untuk proses produksi selanjutnya guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian perlu tersedia modal atau dana pembiayaan untuk pembangunan nasional yang pada dasarnya berasal dari : (1) sumber modal dari dalam negeri dan (2) sumber modal dari luar negeri. Sumber modal dari dalam negeri adalah berupa tabungan yang diciptakan dan dihimpun dengan cara menghemat atau menekan konsumsi sekarang, baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan sumber modal dari luar negeri adalah berupa hibah (grant), bantuan (pinjaman) luar negeri dan penanaman modal asing (Kamaluddin, 1999 : 190). Sumber dana yang berasal dari dalam negeri merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan. Pembangunan dengan modal dari dalam negeri akan membawa bangsa Indonesia belajar untuk mandiri sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam GBHN yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan kekuatan sendiri.

Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor barang dan jasa. Pengerahan dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan (GBHN, 1999 : 25)

Perkembangan serta pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peranan lembaga keuangan (perbankan). Peranan lembaga keuangan adalah sebagai mediator atau penghubung dana dari sektor rumah tangga dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan sebagai investasi. Dengan adanya lembaga

keuangan bagi para debitor atau peminjam dana, lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar serta dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga dapat memperkecil biaya untuk mendapatkan pinjaman untuk investasi (Nopirin, 1985:10)

Perkembangan sektor perbankan baik aspek meningkatnya mobilisasi dana masyarakat maupun aspek kredit perbankan merupakan akibat dari berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang ditempuh pemerintah Indonesia. Kebijakan deregulasi yang dapat dikatakan paling berpengaruh terhadap iklim usaha perbankan adalah deregulasi 27 Oktober 1988 yang memberikan kemudahan pedirian bank dan penurunan cadangan wajib dari 15 % menjadi 2 % telah mendorong bank-bank swasta nasional untuk semakin giat dalam memobilisasi atau menghimpun dana masyarakat dan melakukan ekspansi kredit. Jumlah dana yang dikumpulkan perbankan pada Oktober 1989 baru mencapai 54,3 miliar, tetapi hingga akhir 2002 meningkat menjadi 835,8 triliun. Sedangkan pemberian atau ekspansi kredit pada tahun 1989 adalah 192,9 miliar, tetapi hingga Desember 2002 mencapai 410,3 triliun (BI, 2002:154)

1.2 Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang teguh dibutuhkan oleh setiap negara. Pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya kecukupan modal atau dana serta investasi yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Untuk itu kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri mempunyai peranan penting dalam hal penyediaan dana. Sehingga dari latar belakang masalah, permasalahan yang muncul adalah “seberapa besar kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1988.I-2003.IV”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

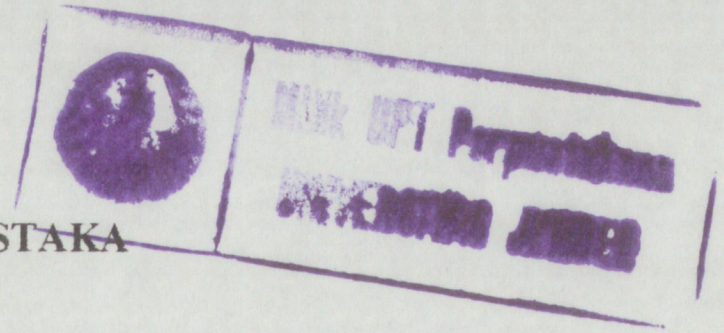
1. Mengetahui seberapa besar jumlah kredit perbankan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1988.I-2003.IV

2. Mengetahui seberapa besar jumlah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1988.I-2003.IV.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat :

1. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam menentukan kebijakan ekonomi baik secara makro maupun mikro khususnya dalam meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti lain sebagai bahan informasi, referensi dan kajian lebih lanjut.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian Khaetami (1996) tentang pengaruh kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri terhadap nilai produksi sektor industri di Propinsi DKI Jakarta tahun 1990-1994 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai produksi sektor industri. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9826 dan uji F yang menunjukkan bahwa variabel bebas (kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri) secara bersama-sama mempengaruhi variabel tak bebas (nilai produksi sektor industri).

Penelitian sejenis yang lain dilakukan oleh Ade Kurniawan (2002) tentang Pengaruh Kredit Perbankan dan Investasi Asing Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Tahun 1994-2001. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata dari variabel bebas (kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri) terhadap variabel tak bebasnya (PDRB Jawa Timur). Hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,688 dan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam memahami ekonomi pembangunan, perlu dibedakan antara pembangunan ekonomi (economic development) dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Dalam pembangunan ekonomi terkandung arti adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat atau GDP di mana kenaikannya dibarengi oleh perombakan dan modernisasi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (income equity). Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (gross domestic product) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa

memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak. Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan (Suryana, 2000:4).

Profesor Kuznet (dalam Suryana, 2000:65) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologis yang diperlukannya. Definisi tersebut memiliki 3 komponen yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. Peningkatan output yang terus menerus dan terpelihara merupakan manifestasi pertumbuhan ekonomi.
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan pertumbuhan dalam menyediakan aneka macam barang pada penduduk.
3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Pembaharuan teknologi harus dibarengi dengan pembaharuan sosial.

Pendapatan nasional sebagai parameter pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu (Guritno, 1994:7) :

1. Pendekatan produksi (production approach)

Pendekatan produksi didasarkan atas penghitungan dari jumlah nilai (nilai=harga dikalikan dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan) barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu perekonomian atau negara pada suatu periode tertentu.

Di Indonesia, menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, di mana kegiatan produksi dibagi menjadi beberapa lapangan usaha. Penjumlahan seluruh hasil kegiatan produksi dari semua lapangan usaha menunjukkan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. GDP di Indonesia dihitung setiap kuartalan dan setiap tahun.

2. Pendekatan pendapatan (income approach)

Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh oleh semua pelaku ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Pendapatan tersebut berupa sewa, bunga, upah, keuntungan, dan sebagainya.

3. Pendekatan pengeluaran (expenditure approach)

Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua sektor ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor luar negeri pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Pengeluaran sektor rumah tangga berupa pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran sektor perusahaan berupa pengeluaran investasi perusahaan, pengeluaran dari pemerintah berupa pengeluaran pemerintah dan dari luar negeri berupa ekspor netto (selisih antara nilai ekspor dan impor).

Faktor produksi (ekonomi) merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor ekonomi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut antara lain (Jhingan, 2000:67-72) :

1. Sumber alam

Dalam pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Akan tetapi kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup dalam pertumbuhan ekonomi. Yang terpenting adalah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber dapat dipergunakan dalam jangka waktu lebih lama.

2. Akumulasi modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Makna pembentukan modal ialah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini

sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian dari padanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin-mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahap yang saling berkaitan yaitu : (a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, (b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke jalur yang dikehendaki, (c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

3. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

4. Kemajuan teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi lain.

5. Pembagian kerja

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Hal ini menaikkan laju pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal atau yang disebut juga dengan investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam PDB. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah (stok) modal. Investasi akan menambah stok modal. Tanpa investasi mungkin tidak ada pabrik atau mesin baru dan dengan demikian tidak ada ekspansi. Pengertian investasi mencakup investasi barang-barang tetap pada perusahaan (business fixed investment), persediaan (inventory) serta perumahan (residential) (Nopirin, 1993:133).

Menurut Dumairi (1997:140) pengertian investasi berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi :

1. Investasi dalam negeri, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta nasional. Pelaksanaan investasi dalam negeri dapat dibedakan atas investasi pemerintah (public investment) dan investasi swasta. Investasi pemerintah merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang pada hakekatnya tidak untuk mendapatkan keuntungan semata karena tujuan utamanya yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasional, sedangkan investasi swasta dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
2. Investasi asing (foreign investment), yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta asing. Investasi ini terjadi akibat adanya selisih antara ekspor dan impor.

Pembangunan tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya pemupukan modal dalam negeri sebesar-besarnya dan yang paling penting adalah kapasitas modal dari perusahaan supaya dinamika dan daya kreatif masyarakat dapat menimbulkan akumulasi modal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Penanaman modal (investasi) dalam hal ini merupakan penanaman modal pada barang-barang modal atau juga disebut sebagai investasi langsung, karena investasi ini berkaitan erat dengan pembangunan di sektor-sektor riil. Peranan pemerintah dalam hal ini sangat vital sebagai pelopor pembangunan karena dengan adanya penanaman modal yang terencana dengan jumlah yang cukup besar maka pemerintah dapat merintis dan merangsang penanaman modal

dari masyarakat pada umumnya (Suparmoko, 1995:82). Beberapa teori yang mengemukakan tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain :

1. Pandangan Kaum Klasik Tentang Peranan Kapital Dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Adam Smith (dalam Jhingan, 2003:81) pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan :(1) meningkatkan keterampilan pekerja, (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang, (3) penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu dari pada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan. Maka dari itu cara yang paling tepat adalah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

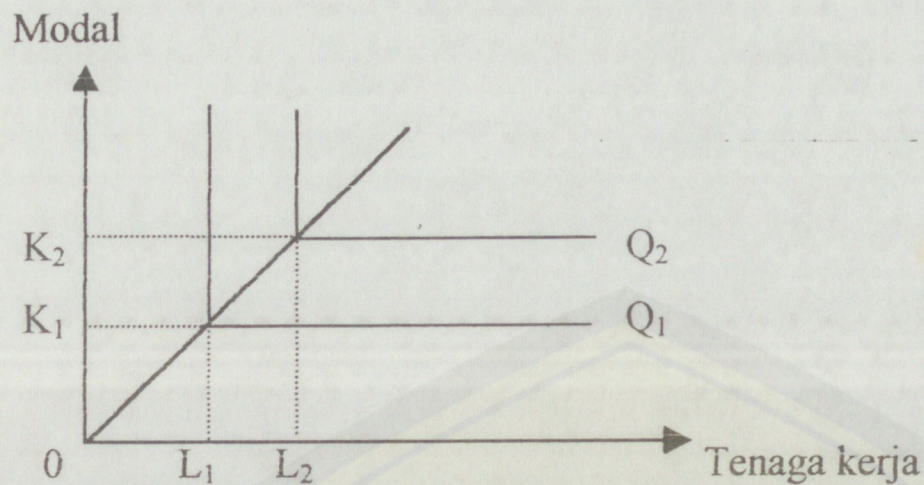
Adam Smith (dalam Boediono, 1992:11) berkaitan dengan peran aktif dari stok kapital bagi pertumbuhan ekonomi mengajukan teori tentang spesialisasi dan pembagian kerja. Menurutnya stok kapital (K) mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output total (Q). Pengaruh pertama adalah pengaruh langsung dan yang kedua adalah pengaruh tidak langsung. Stok kapital bisa mempengaruhi output total secara langsung karena stok kapital yang diikuti oleh penambahan tenaga kerja akan meningkatkan output total. Makin banyak input makin banyak output. Pengaruh tidak langsung dari stok kapital terhadap output total adalah berupa

peningkatan produktivitas per pekerja melalui spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Menurut Adam Smith makin besar stok kapital akan memperbesar kemungkinan dilaksanakannya spesialisasi dan pembagian tenaga kerja yang selanjutnya akan semakin meningkatkan produktivitas per pekerja. Dengan kata lain semakin tinggi stok kapital akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

2. Peranan Investasi Menurut Harrod-Domar

Harrod-Domar menekankan pentingnya peranan investasi dalam proses pertumbuhan. Harrod-Domar mengemukakan bahwa investasi mempunyai peranan ganda yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai dampak permintaan dan yang kedua dampak penawaran investasi. Karena itu selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian untuk mempertahankan tingkat equilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut, keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Kalau tidak setiap perbedaan antara keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas nganggur. Hal ini memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan menggeser perekonomian keluar jalur equilibrium pertumbuhan mantap. Jadi apabila pekerjaan hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar (Jhingan, 2003:229).

Dalam teori Harrod-Domar (dalam Arsyad, 1999:65), fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak substitutif). Untuk menghasilkan output sebesar Q_1 diperlukan modal K_1 dan tenaga kerja L_1 , dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat output berubah. Untuk output sebesar Q_2 hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar K_2 .



Gambar 2.1: fungsi produksi Harrod-Domar

Menurut Harrod-Domar setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasional jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dengan output total (Y). Misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal output tersebut. Hubungan tersebut dikenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Jika terdapat hubungan bahwa 3 rupiah modal akan menghasilkan output sebesar 1 rupiah, maka dapat dikatakan bahwa COR adalah 3 berbanding 1. Oleh karena itu, konsep ini dapat juga didefinisikan sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut.

Jika ditetapkan $COR = k$, rasio kecenderungan menabung (MPS) = s yang merupakan proporsi tetap dari output total, dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan, maka dapat disusun model pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), oleh karenanya didapat persamaan:

$$S = s Y \quad (I)$$

Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan dengan ΔK , maka :

$$I = \Delta K \quad (II)$$

Tetapi karena stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan output total (Y) seperti ditunjukkan oleh COR atau k, maka :

$$K / Y = k \text{ atau } \Delta K / \Delta Y = k \text{ atau } \Delta K = k \cdot \Delta Y \quad (IIa)$$

Karena tabungan total (S) harus sama dengan investasi total (I) maka :

$$S = I \quad (III)$$

Dari persamaan (I), (II), dan (IIa) dapat ditulis identitas dari tabungan sama dengan investasi sebagai berikut :

$$S = s \cdot Y = k \cdot \Delta Y = \Delta K = I \text{ atau } s \cdot Y = k \cdot \Delta Y$$

Dan akhirnya didapat :

$$\Delta Y / Y = s / k \quad (IV)$$

$\Delta Y / Y$ pada persamaan tersebut (IV) menunjukkan tingkat pertumbuhan output (persentase perubahan output). Persamaan (IV) merupakan persamaan Harrod-Domar yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output ($\Delta Y / Y$) ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal output (COR=k). Secara spesifik persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan dan diinvestasikan, makin tinggi pula output. Sedangkan hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif (makin besar COR, makin rendah tingkat pertumbuhan output). Logika dari persamaan tersebut adalah jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh.

3. Investasi menurut Neo-Keynes

Tokoh-tokoh Neo-keynes merupakan tokoh-tokoh yang memperbaharui dan mengembangkan pandangan-pandangan Keynes. Tokoh-tokoh yang mengemukakan peranan investasi antara lain :

a. John R. Hicks (1904-...)

Hicks bersama-sama dengan Hansen memperkenalkan analisis IS-LM. Dengan analisis IS-LM dapat lebih mudah mengetahui bagaimana terjadinya

keseimbangan umum, baik di pasar barang (kurva IS) maupun pasar uang (kurva LM). Kurva IS merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga dan pendapatan nasional di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Kurva IS mempunyai lereng yang negatif di mana semakin tinggi tingkat bunga maka semakin rendah pendapatan nasional, begitu pula sebaliknya. Menurut Hicks Investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga, di mana semakin tinggi tingkat bunga maka semakin rendah investasi, begitu juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat bunga maka investasi akan semakin rendah sehingga menyebabkan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi) semakin rendah. Sebaliknya semakin rendah tingkat bunga maka investasi akan semakin tinggi sehingga menyebabkan pendapatan nasional semakin tinggi.

b. Paul Samuelson (1915-...)

Menurut Samuelson dampak investasi terhadap perekonomian menjadi berlipat ganda karena adanya multiplier. Besarnya angka pengganda atau multiplier ini sangat ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi (*propensity to consume*) masyarakat, makin besar angka pengganda. Makin besar kecenderungan mengkonsumsi, makin besar angka pengganda, dan makin besar pula dampak investasi terhadap perekonomian. Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi jauh lebih besar karena adanya akselerator. Prinsip akselerator secara sederhana mengatakan bahwa perubahan dalam pendapatan nasional akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam jumlah investasi, dan perubahan dalam investasi pada giliran berikutnya akan menyebabkan bertambahnya pendapatan nasional melalui apa yang disebut proses akselerasi, yang sifatnya kumulatif.

4. Teori Dorongan Kuat (*Big Push*) Rosenstein-Rodan.

Menurut Rosenstein-Rodan untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu dorongan kuat dari investasi atau suatu program besar-besaran yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum suatu investasi tertentu. Jadi ada sejumlah minimum sumber-sumber produksi dalam jumlah

besar yang harus disediakan jika suatu program pembangunan diharapkan dapat berhasil.

Teori ini menyatakan bahwa cara kerja atau kegiatan investasi sedikit demi sedikit tidak akan dapat mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan, tetapi suatu jumlah minimum investasi yang besar-besaran merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Ia memerlukan terciptanya atau tercapainya ekonomi eksternal, yang timbul pada pembangunan secara serentak atas industri-industri yang secara teknik saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan demikian syarat mutlak seperti itu dan terciptanya ekonomi eksternal yang dihasilkan dari sejumlah minimum investasi tertentu tersebut merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil.

2.2.3. Kredit Perbankan

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Keberhasilan suatu bank sebagian besar tergantung dari usaha perkreditannya, di mana kurang lebih 75 persen penghasilan bank adalah dari kegiatan-kegiatan kredit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Susilo, 2000:70).

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga dapat dikatakan pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama. Berdasarkan hal-tersebut maka unsur-unsur dalam kredit adalah :

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan memberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa yang akan datang.

2. Waktu, artinya bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu.
3. Degree of risk, artinya pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko, di masa-masa tengang adalah masa yang abstrak.
4. Prestasi, artinya yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa uang/jasa/barang.

Pemberian kredit oleh bank dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika bank betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Berdasarkan hal tersebut tersimpul unsur keamanan (safety) dan unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit. Keamanan (safety) yang dimaksud adalah prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan. Keuntungan (profitability) merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah sebagai agent of development adalah untuk :

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kehidupan

perekonomian bank memegang peranan penting selaku lembaga keuangan yang membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran. Fungsi kredit dalam perekonomian secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari uang dan barang.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas usahanya, sehingga pada dasarnya melalui kredit terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Produsen dengan bantuan kredit bank, dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Disamping itu dengan bantuan kredit produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit dapat disalurkan melalui rekening-rekening karena pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, dan sebagainya. Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

3. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dari produktivitasnya.

4. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka kredit bank memegang peranan yang penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif yaitu pengarahannya ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Setiap kredit benar-benar diarahkan untuk menambah flow of goods serta memperlancar distribusi barang-barang tertentu agar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kredit bank dijalankan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

5. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Pengusaha yang memperoleh kredit akan berusaha meningkatkan usahanya sehingga sehingga profit meningkat. Profit yang meningkat berarti pajak perusahaan juga meningkat. Di lain pihak kredit yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa negara. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga dapat dikatakan melalui kredit, pendapatan nasional akan bertambah.

6. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan yaitu bunga yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu dari sudut tujuannya, jangka waktunya, jaminannya dan penggunaannya.

Kredit dilihat dari sudut tujuannya terdiri atas :

1. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh produk yang bersifat pemenuhan konsumsi
2. Kredit produktif, merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi
3. Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas :

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Kredit dilihat dari sudut jaminannya terdiri atas :

1. Kredit tanpa jaminan
2. Kredit dengan jaminan, di mana jaminan/agunan bisa berupa agunan pribadi, agunan barang dan agunan saham, obligasi dan sertifikat.

Kredit dilihat dari sudut penggunaannya terdiri atas :

1. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Kredit modal kerja biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah.
2. Kredit konsumsi, merupakan kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.
3. Kredit investasi, merupakan kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Kredit investasi biasanya berjangka menengah atau panjang, karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasan oleh nasabah melalui angsuran.

2.2.4. Hubungan Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

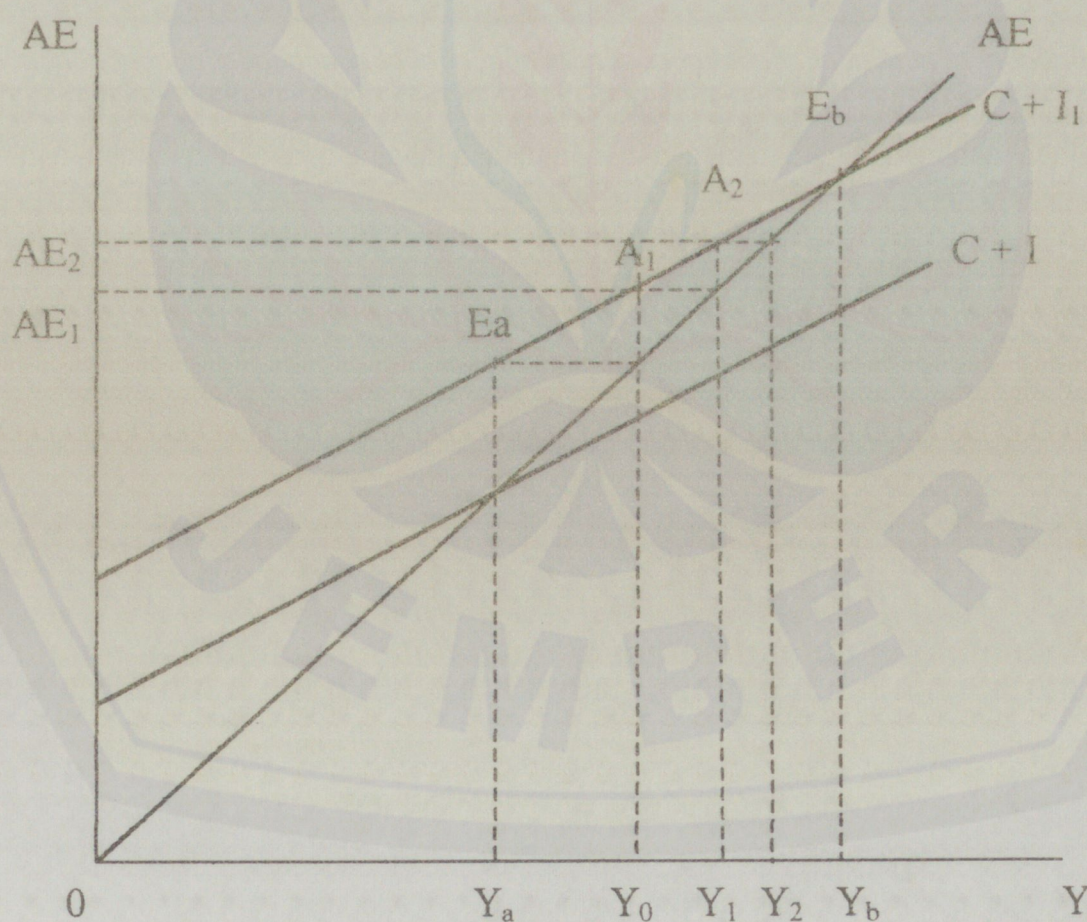
Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perkreditan merupakan alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Semua jenis kredit yang diberikan oleh bank umum (kredit konsumtif maupun kredit produktif) pada dasarnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Kredit konsumsi yang diberikan bank umum kepada masyarakat akan membuat pendapatan masyarakat meningkat sehingga menyebabkan konsumsi meningkat. Besarnya kecenderungan mengkonsumsi (*propensity to consume*) masyarakat akan berpengaruh terhadap investasi. Menurut Samuelson dampak investasi terhadap perekonomian menjadi berlipat ganda karena adanya multiplier. Besarnya angka pengganda atau multiplier ini sangat ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi masyarakat. Makin besar kecenderungan mengkonsumsi, makin besar angka pengganda dan makin besar pula dampak investasi terhadap perekonomian (Deliarnov, 1995:169). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit konsumsi akan menaikkan pendapatan masyarakat dan menaikkan agregat demand. Kenaikan agregat demand akan mendorong pengusaha untuk menaikkan investasi agar hasil produksi meningkat, yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kredit produktif yang diberikan bank umum kepada masyarakat (sektor riil) akan menyebabkan bertambahnya jumlah modal pada sektor riil. Bertambahnya jumlah modal ini akan mendorong sektor riil untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat (Sukirno, 1994:107).

2.2.5. Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penanaman modal yang lazim disebut juga dengan istilah investasi merupakan komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Untuk menambah kemampuan memproduksi haruslah menambah barang-barang modal, menambah tenaga kerja dan menambah pembelian bahan-bahan mentah yang diperlukan. Penggunaan barang-barang modal baru, pekerja-pekerja baru dan pembelian tambahan atas bahan-bahan mentah tersebut akan menaikkan pendapatan nasional. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut (Sukirno, 1994:123):

Gambar 2.2 : Proses Multiplier



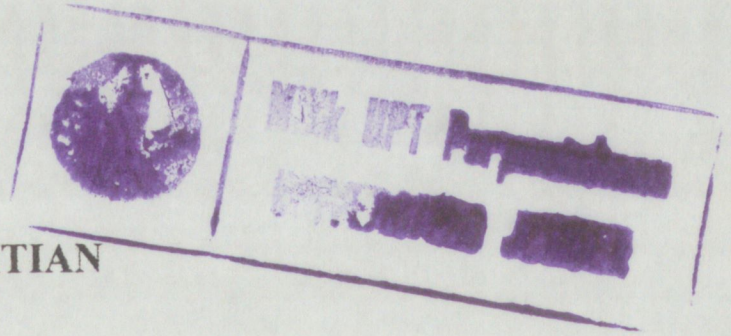
Dimisalkan pengeluaran agregat adalah pada tingkat yang digambarkan oleh $C+I$, dengan tingkat keseimbangan perekonomian pada titik Ea dengan pendapatan nasional sebesar Y_a . Jika pengusaha menambah investasi menambah sebanyak ΔI

sehingga tingkat investasi bertambah dari I menjadi I_1 . Pertambahan investasi tersebut menaikkan pengeluaran agregat, seperti yang ditunjukkan oleh fungsi $C+I_1$. Sesudah terjadinya kenaikan pengeluaran agregat menjadi $C+I_1$ pendapatan nasional akan mencapai sebesar Y_0 , dan pengeluaran agregat dalam perekonomian adalah ditunjukkan oleh titik A_1 . Dapat dilihat bahwa $AE_1 > Y_0$, berarti dalam perekonomian terdapat kelebihan permintaan sehingga pengusaha menaikkan produksi ke Y_1 , karena pada tingkat pendapatan tersebut AE_1 adalah sama dengan tingkat pendapatan nasional yang dicapai (Y_1). Tetapi apabila pendapatan nasional mencapai tingkat tersebut, pengeluaran agregat menjadi di titik A_2 berarti bernilai sebesar AE_2 . Dapat dilihat bahwa $AE_2 > Y_1$. Pengeluaran agregat yang lebih besar daripada pendapatan nasional akan menggalakkan para pengusaha untuk menaikkan produksi lagi sehingga menimbulkan kenaikan baru pendapatan nasional menjadi Y_2 . Pada tingkat pendapatan nasional ini juga kelebihan permintaan agregat maka pengusaha intensif akan menaikkan produksi. Keseimbangan perekonomian negara yang baru hanya akan tercipta apabila tidak terdapat lagi kelebihan permintaan dalam masyarakat. Keadaan ini tercapai pada titik E_b dan pada tingkat keseimbangan itu pendapatan nasional adalah Y_b . Dengan demikian pertambahan investasi perusahaan sebesar ΔI akan menaikkan pendapatan nasional dari Y_a menjadi Y_b .

2.3. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. kredit perbankan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988.I - 2003.IV.
2. penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988.I - 2003.IV.



III. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

3.1.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *explanatory research*, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pola hubungan dan sifat hubungan antara dua variabel atau lebih.

3.1.2. Unit analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kegiatan kredit perbankan, penanaman modal dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1988.I-2003.IV.

3.2. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series) kuartalan untuk periode pengamatan tahun 1988 hingga 2003. Data tentang pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui Produk Domestik Bruto (PDB) riil menurut lapangan usaha. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan buku literatur yang digunakan sebagai pendukung penelitian.

Bila data tidak tersedia dalam kuartalan akan dilakukan interpolasi linier untuk mendapatkan data kuartalan. Formulasi interpolasi linier adalah sebagai berikut (Insukindro, 1993:42) :

$$Y_{t_1} = \frac{1}{4}(Y_t - 4,5 / 12 (Y_t - Y_{t-1}))$$

$$Y_{t_2} = \frac{1}{4}(Y_t - 1,5 / 12 (Y_t - Y_{t-1}))$$

$$Y_{t_3} = \frac{1}{4}(Y_t + 1,5 / 12 (Y_t - Y_{t-1}))$$

$$Y_{t_4} = \frac{1}{4}(Y_t + 4,5 / 12 (Y_t - Y_{t-1}))$$

Di mana : Y_t = data tahun ke-t

Y_{t-1} = data sebelum tahun t

$Y_{t_{1,2,3,4}}$ = data triwulan 1,2,3,4

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model Regresi Linier Berganda (Multiple Regression Model) dengan melakukan uji model klasik (OLS- Ordinary Least Square) atau kuadrat terkecil klasik (CLS-Classical Least Square), yaitu (Arief, S, 1993 : 5).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

dimana:

Y = pertumbuhan ekonomi

X_1 = kredit perbankan

X_2 = penanaman modal dalam negeri

β_0 = besarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri sama dengan nol.

β_1 = besarnya pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

β_2 = besarnya pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

e = *error term*

3.3.2 Uji Statistik

3.3.2.1. Uji F (F-test)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel bebas (X_1, X_2), yakni (Arief, 1993 : 8):

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

R^2 = koefisien determinasi

k = banyaknya variabel bebas

n = banyaknya sampel

Perumusan hipotesa :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel dependen;

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, kriteria pengujian hipotesis:

- Apabila F probabilita lebih kecil dari α , berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, maka secara serentak variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila F probabilita lebih besar dari α , berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, maka secara serentak variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3.3.2.2. Uji t (t-test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen dengan rumus sebagai berikut (Arief, 1993 : 9):

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

dimana: β_i = koefisien regresi

$S\beta_i$ = standar deviasi

Perumusan hipotesa:

$H_0 : \beta_i = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel dependen;

$H_a : \beta_i \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, kriteria pengujian hipotesis:

- Apabila t probabilita lebih kecil dari α , berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, maka secara serentak variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

b. Apabila t probabilita lebih besar dari α , berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, maka secara serentak variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3.3.2.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien ini digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan seluruh variabel yang tercakup dalam model regresi terhadap varian variabel terikat digunakan rumus koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut (Arief, 1993:7):

$$R^2 = \frac{ESS}{RSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

Dimana:

R^2 = koefisien determinasi

ESS = jumlah kuadrat regresi

TSS = jumlah total kuadrat

RSS = jumlah kuadrat residual

3.3.3. Uji Ekonometrika

3.3.3.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan cara melakukan regresi sederhana antara dua variabel dengan menjadikan salah satu variabel bebas sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas dalam model adalah dengan membandingkan koefisien determinasi hasil regresi sederhana (r^2) dengan koefisien determinasi hasil regresi berganda (R^2). Kemungkinan adanya mutikolinieritas dapat dideteksi apabila nilai koefisien determinasi hasil regresi sederhana (r^2) lebih besar dari hasil regresi berganda (R^2), namun multikolinieritas dapat diabaikan atau dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika jika nilai R^2 regresi awal lebih besar dari R^2 regresi antar variabel bebas (Arief, 1993:25).

Selain itu dapat menggunakan uji VIF yang dikombinasikan dengan ukuran toleransi (tolerance/TOL), untuk melihat bagaimana varian dari suatu

penaksir (estimator) meningkat seandainya ada multikolinieritas dalam suatu model empiris. VIF dirumuskan sebagai berikut (Aliman, 2000:27) :

$$VIF = \frac{1}{(1 - R^2)}$$

Sebagai *rule of thumb* dari VIF, jika VIF suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0,90, maka suatu variabel dikatakan berkorelasi tinggi. Sedangkan rumus dari TOL adalah (Aliman, 2000:28):

$$TOL = \left(\frac{1}{VIF} \right)$$

Sebagai *rule of thumb* dari TOL, adalah :

- a. jika $TOL = 1$, maka ada kolinieritas antar variabel
- b. jika $TOL = 0$, maka tidak ada kolinieritas sempurna antar variabel bebas.

3.3.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah varian dari gangguan adalah beragam untuk semua observasi. Adanya heteroskedastisitas tidak berpengaruh terhadap ketidakhiasan dan konsistensi estimator, tetapi persyaratan varian minimum tidak dapat tercapai sepenuhnya sehingga kurang efisien. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan langkah-langkah sebagai berikut (Arief, 1993:34) :

- a. Melakukan regresi variabel dependen (Y) terhadap semua variabel independen (X1 dan X2) dan memperoleh nilai residual (e)
- b. Melakukan regresi dari nilai absolut residual (e) terhadap variabel independen (X1 dan X2) sehingga diperoleh persamaan regresi :

$$[e] = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + v_i$$

- c. Menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat nilai t probabilita
 - a. Jika t probabilita α lebih besar dari *level of significance* maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika t probabilita α lebih kecil dari *level of significance* maka terjadi heteroskedastisitas.

3.3.3.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode yang lain atau dengan kata lain variabel gangguan tidak random.

Untuk mengetahui apakah dijumpai adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson test. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Durbin-Watson yang dihitung (d) dengan nilai batas atas (d_l) yang ada pada tabel Durbin-Watson seperti dijelaskan oleh (Arief, 1993 : 12), selang kepercayaan dapat diberikan dengan melibatkan lima wilayah dengan menggunakan d_l (batas bawah) dan d_u (batas atas) sebagai berikut:

- a. Jika $d < d_l$, menolak H_0 (ada korelasi positif).
- b. Jika $d > 4 - d_u$, menolak H_0 (ada korelasi negatif).
- c. Jika $d_u < d < 4 - d_u$, terima H_0 (tidak ada korelasi).
- d. Jika $d_l < d < d_u$, pengujian tidak dapat disimpulkan.
- e. Jika $(4 - d_u) < d < (4 - d_l)$, pengujian tidak dapat disimpulkan.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukurannya

Untuk menghindari salah pengertian dan meluasnya permasalahan maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Kredit perbankan adalah jumlah kredit rupiah dan valuta asing yang disalurkan oleh bank umum di Indonesia. Kredit perbankan dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan miliar rupiah yang dilogaritmakan.

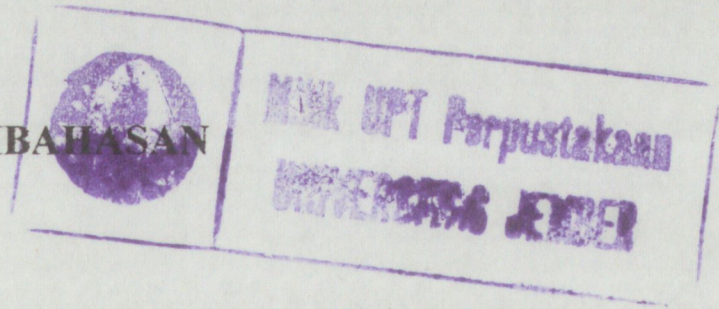
Yang tidak termasuk kredit perbankan dalam penelitian ini adalah kredit kepada Pemerintah Pusat, kredit kepada bukan penduduk, kredit kelolaan, nilai lawan valuta asing, pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek, bantuan proyek, dan biaya lokal rekening dana investasi.

Bank umum adalah bank umum yang menghimpun dana dari masyarakat dan dapat menciptakan uang giral serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum dikelompokkan menjadi

Bank Persero, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Campuran.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1968) adalah penggunaan dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara dan swasta nasional atau asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan untuk menjalankan suatu usaha. Penanaman Modal Dalam Negeri dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan miliar rupiah yang dilogaritmakan.
3. Pertumbuhan ekonomi adalah tambahan/peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di berbagai bidang usaha. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dilakukan dengan alat ukur Produk Domestik Bruto riil yang dinyatakan dalam prosentase.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN



4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Serangkaian kebijaksanaan yang diambil sejak awal tahun 1980-an untuk menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal dan sekaligus meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Serangkaian kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah meliputi bidang moneter dan keuangan, fiskal, perdagangan dan investasi. Kebijaksanaan tersebut telah mampu meningkatkan kegiatan dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga tercapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan meningkat cukup berarti yaitu sebesar 5,7 persen pada tahun 1988 dibandingkan dengan 4,8 persen pada tahun 1987. Khusus dalam tahun 1989, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) V, pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 1982 dapat dicapai sebesar 7,5 persen. Pertumbuhan tersebut melebihi target Repelita V sebesar rata-rata 5 persen per tahun. Ditinjau dari sisi produksi, lebih tingginya laju pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh semakin mantapnya pertumbuhan baik sektor nonmigas maupun sektor migas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 1992 tercatat masih cukup tinggi, walaupun sedikit lebih rendah dari pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi (diukur dengan persentase perubahan PDB) yang pada tahun 1991 tercatat sebesar 6,6 persen pada tahun 1992 menurun menjadi 6,5 persen. Namun pertumbuhan tersebut masih di atas sasaran rata-rata Repelita yaitu 5 persen pertahun. Meningginya suhu perekonomian tersebut merupakan akibat sampingan dari keberhasilan kebijaksanaan deregulasi serta kebijaksanaan pendukung lainnya yang ditempuh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak Paket Kebijakan 27 Oktober 1988, yang telah mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di dalam negeri terutama untuk investasi.

Tahun 1997 merupakan tahun yang terberat dalam tiga puluh tahun pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Diawali oleh krisis nilai tukar yang terjadi sejak semester II tahun 1997, kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Proses penyebaran krisis berkembang cepat mengingat tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan pada sektor luar negeri yang sangat besar. Dengan semakin parahnya krisis yang terjadi, kegiatan intermediasi di sektor keuangan, terutama perbankan terganggu, sehingga aliran dana untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi mengalami berbagai hambatan. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami kontraksi yang tajam, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) merosot menjadi 4,7 persen pada tahun 1997 dibandingkan dengan 7,8 persen pada tahun sebelumnya. Dan pada tahun 1998 krisis ekonomi di Indonesia telah berkembang semakin dalam dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 13,2 persen.

Dengan kondisi dalam negeri dan luar negeri yang kondusif, tanda-tanda perbaikan ekonomi Indonesia mulai tampak dalam tahun 1999. Hal ini terlihat pada PDB riil yang mencatat pertumbuhan positif 0,79 persen. Perbaikan ekonomi terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi swasta dan pemerintah, mulai pulihnya kegiatan produksi di sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa dan sektor listrik, gas dan air minum, serta berlanjutnya kenaikan produksi di sektor pertanian. Dan pada tahun 2000 perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dengan pola pertumbuhan ekonomi yang semakin seimbang. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2000 mencapai 4,9 persen, lebih tinggi dari prakiraan awal tahun Bank Indonesia sebesar 3,0 - 4,0 persen.

Dalam tahun 2002, secara umum kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangna positif yang ditandai dengan semakin stabilnya kondisi makro ekonomi. Membaiknya indikator-indikator makro moneter seperti nilai tukar, inflasi dan suku bunga, perekonomian Indonesia selama tahun 2002 secara umum masih mengindikasikan berlangsungnya proses pemulihan ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapai 3,7 persen

disertai dengan belum seimbangannya struktur pertumbuhan ekonomi. Ketidakseimbangan struktur pertumbuhan ekonomi tersebut tercermin dari masih besarnya ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada konsumsi.

Selama tahun 2003, perekonomian Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain terkait dengan dampak tragedi bom Bali tahun 2002, rencana untuk keluar dari program International Monetary Fund (IMF) pada akhir 2003, dan kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil serangkaian langkah kebijakan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi sembari tetap menjaga kestabilan ekonomi makro. Berbagai langkah kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tercapainya kondisi ekonomi makro yang stabil dan cenderung membaik selama 2003. Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik dan lebih stabil selama 2003 sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, laju inflasi dan suku bunga yang menurun tajam, dan nilai tukar rupiah yang menguat dengan pergerakan yang lebih stabil.

Tabel 4.1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1988-2003

TAHUN	PDB	PERTUMBUHAN (%)
1988	99.981,4	5,7
1989	107.522,8	7,5
1990	115.447,1	7,4
1991	123.225,2	6,6
1992	131.184,8	6,5
1993	329.775,9	7,3
1994	354.641,0	7,5
1995	383.767,6	8,2
1996	413.7691	7,8
1997	433.6854	4,8
1998	376.374,8	-13,22
1999	379.352,5	0,79
2000	398.016,8	4,92
2001	411.753,5	3,45
2002	426.942,9	3,69
2003	444.447,6	4,1

Sumber : Laporan tahunan Bank Indonesia edisi tahun 1988-2003.

4.1.2. Perkembangan Kredit Perbankan di Indonesia.

Kredit perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. Paket kebijakan tersebut secara bersama-sama dan saling menunjang dengan kebijakan di sektor-sektor lain diharapkan akan dapat lebih meningkatkan pengaliran dana masyarakat guna membiayai kegiatan pembangunan. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran Kebijakan 27 Oktober 1988, Pemerintah juga menempuh kebijakan dalam bidang kelembagaan. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam membuka kantor bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), memperkenankan pendirian bank baru, mendorong perbankan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk tabungan yang menarik, memperingan persyaratan bagi bank menjadi bank devisa, serta memperkenankan pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing. Sementara itu, liquiditas wajib minimum yang semula ditetapkan sebesar 15 % dari kewajiban diturunkan menjadi 2 %. Hal tersebut menyebabkan bank umum banyak melakukan ekspansi kredit.

Kredit perbankan pada tahun 1988 sebesar Rp 44.001 miliar dan pada tahun 1990 meningkat pesat menjadi Rp 97.696 miliar. Kredit perbankan yang terdiri atas rupiah dan valuta asing pada tahun 1992 mengalami pertumbuhan yang melambat, yaitu 8,0 % dibandingkan dengan 16,1 % pada tahun 1991. Hal ini disebabkan oleh Paket Kebijakan 28 Februari 1991 yang dikeluarkan Pemerintah yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan operasional perbankan atas dasar prinsip kehati-hatian. Melalui paket kebijakan tersebut dilakukan penyempurnaan antara lain ketentuan mengenai CAR dan LDR. Penentuan CAR tersebut dilakukan secara bertahap yaitu sebesar 5 % pada akhir Maret 1992, 7 % pada akhir Maret 1993, dan 8 % pada akhir Desember 1993.

Perkembangan usaha perbankan yang terlampau cepat pada tahun 1989 dan 1990, yang diikuti oleh semakin tajamnya persaingan telah menyebabkan banyak bank kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian kredit. Sebagai akibatnya, banyak bank yang dihadapkan pada meningkatnya kredit bermasalah. Keadaan tersebut diperberat pula oleh

penurunan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam tahun 1991 dan 1992 serta relatif tingginya tingkat suku bunga sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam rangka mendinginkan suhu perekonomian dalam negeri. Melalui Paket Mei 1993 telah dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang dirasakan terlalu memberatkan beban bank, khususnya dalam hal permodalan dan penilaian tingkat kesehatan bank. Kemajuan dicapai oleh perbankan dalam proses konsolidasi yang tercermin pada pesatnya kenaikan kredit perbankan yang mencapai 24% pada tahun 1994.

Pada tahun 1997 perbankan nasional mengalami krisis yang berat sebagai dampak negatif dari bergejolaknya nilai tukar rupiah dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Melemahnya nilai tukar rupiah telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang besar pada perbankan. Situasi tersebut kemudian diperberat oleh lemahnya kondisi internal sektor perbankan terutama sebagai dampak dari lemahnya manajemen, konsentrasi kredit yang berlebihan, dan kurang transparannya informasi kondisi keuangan bank dan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Konsentrasi kredit yang berlebihan membuat jumlah kredit perbankan pada tahun 1997 menjadi sebesar Rp 378.134 miliar, berbeda dengan tahun 1996 yang hanya sebesar Rp 292.921 miliar. Dan pada tahun 1998 jumlah kredit perbankan meningkat menjadi Rp 487.426 miliar. Ekspansi kredit tersebut banyak melanggar ketentuan kehati-hatian sehingga banyak terjadi kredit bermasalah dan merugikan bank. Melihat kondisi tersebut pada tahun 1998 Pemerintah menetapkan program restrukturisasi perbankan yang bersifat menyeluruh. Program tersebut difokuskan pada empat pilar kebijakan, yaitu (1) program penyehatan perbankan, (2) perbaikan kondisi internal perbankan, (3) penyempurnaan perangkat hukum perbankan, dan (4) peningkatan fungsi pengawasan perbankan. Pilar kedua diwujudkan melalui penyempurnaan ketentuan kehati-hatian yang disesuaikan, yang meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Keuangan Tahunan dan Publikasi serta Posisi Devisa Netto. Akibat diberlakukannya ketentuan tersebut jumlah kredit perbankan pada tahun 1999 menurun menjadi Rp 225.133 miliar.

Dalam tahun 2002 kebijakan perbankan difokuskan pada kesinambungan upaya pelaksanaan program restrukturisasi perbankan. Hal ini dilakukan melalui : (1) program penyehatan perbankan, (2) program pemanfaatan ketahanan sistem perbankan, dan (3) program pemulihan fungsi intermediasi perbankan. Secara umum kinerja perbankan pada tahun 2002 menunjukkan perkembangan yang membaik. Perbaikan tersebut tercermin dari terus berlangsungnya proses pemulihan fungsi intermediasi seperti meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan. Selain itu, perbaikan sektor perbankan juga terlihat dari meningkatnya permodalan dan profitabilitas, serta membaiknya kualitas kredit. Dalam tahun 2003 proses pemulihan fungsi intermediasi perbankan terus menunjukkan perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan outstanding kredit dan realisasi penyaluran kredit baru serta terjadinya perubahan struktur aktiva produktif bank. Kredit perbankan terus menunjukkan tren yang meningkat, terutama kredit rupiah. Sementara kredit valas berfluktuasi karena adanya pengaruh perubahan nilai tukar. Hingga akhir tahun 2002 kredit perbankan mencapai Rp 365.410 miliar dan meningkat menjadi Rp 437.942 miliar pada tahun 2003.

4.1.3. Perkembangan PMDN di Indonesia.

Investasi di Indonesia mulai berkembang dengan pesat sejak Pemerintah mengeluarkan serangkaian deregulasi di bidang investasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN. Namun mulai dari tahun-tahun awal pembangunan hingga kini PMDN masih mempunyai proporsi yang lebih besar dalam jumlah investasi yang ada di Indonesia secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan jumlah PMA yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Perkembangan PMDN dan PMA tahun 1988-2003

Tahun	PMDN	Proporsi (%)	PMA	Proporsi (%)	Investasi
1988	14.915,9	65,8	7.748,2	34,2	22.664,1
1989	19.593,9	69,8	8.472,5	31,2	28.066,4
1990	56.510,5	77,3	16.635,6	22,7	73.146,1
1991	41.007,7	70,1	17.486,2	29,9	58.493,9
1992	29.341,7	58,0	21.265,4	42,0	50.607,1
1993	39.450,4	69,7	17.184,3	31,3	56.634,7
1994	53.289,1	50,5	52.193,5	49,5	105.482,6
1995	69.853,1	43,1	92.123,1	56,9	161.976,2
1996	100.715,2	58,5	71.326,5	41,5	172.041,7
1997	119.872,9	43,3	157.321,1	56,7	277.194,0
1998	60.749,3	35,8	108.843,9	64,2	169.593,2
1999	53.550,0	40,9	77.323,3	59,1	130.873,3
2000	92.327,7	80,3	22.593,0	19,7	114.920,7
2001	58.674,0	79,6	15.044,2	21,4	73.718,2
2002	25.262,3	72,2	9.744,1	27,8	35.006,4
2003	48.484,0	78,6	13.207,2	21,4	61.691,2

Sumber : Laporan tahunan Bank Indonesia edisi tahun 1988-2003

Rencana PMDN yang disetujui Pemerintah dalam tahun 1988 naik cukup tinggi yaitu mencapai Rp 14.915,9 miliar (845 proyek) dibandingkan dengan Rp 10.265 miliar (566 proyek) dalam tahun sebelumnya. Jumlah rencana investasi yang disetujui sejak diberlakukannya Undang-Undang PMDN pada bulan Juli 1968 sampai dengan akhir 1988 mencapai Rp 60.903 miliar yang meliputi 4.989 proyek. Ditinjau dari bidang usaha, nilai rencana investasi dan jumlah proyek yang disetujui sebagian besar terdapat pada bidang usaha industri serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Dalam tahun 1989, rencana PMDN yang disetujui Pemerintah mencapai Rp 19.593,9 miliar yang meliputi 863 proyek. Seperti pada tahun 1988, rencana PMDN yang disetujui sebagian besar terjadi pada sektor industri yang mencapai Rp 12.933,7 miliar. Bagian terbesar dari rencana PMDN

pada sektor industri tersebut terjadi pada industri kimia dan farmasi serta industri tekstil.

Rencana PMDN yang disetujui Pemerintah meningkat pesat dalam tahun 1990. Keadaan ini disebabkan oleh semakin besarnya peran serta sektor swasta dalam kegiatan pembangunan serta keberhasilan Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi melalui serangkaian kebijaksanaan yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun 1990, Pemerintah menyetujui permohonan investasi baru dan perluasan investasi dalam rangka PMDN untuk 1.329 proyek dengan nilai Rp 56.510,5 miliar, yang berarti meningkat menjadi tiga kali lipat nilai investasi yang disetujui Pemerintah dalam tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 1991 jumlah PMDN yang disetujui Pemerintah menurun menjadi Rp 41.007,7 miliar dan menurun lebih tajam pada tahun 1992 menjadi Rp 29.341,7 miliar. Penurunan jumlah PMDN ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan pendapatan nasional. Dengan melambatnya pertumbuhan pendapatan nasional, pertumbuhan tabungan nasional bruto secara nominal juga mengalami kelambatan sehingga laju pertumbuhan investasi secara keseluruhan juga mengalami penurunan.

Dalam tahun 1993, Pemerintah berupaya untuk menurunkan suku bunga yang diperlukan guna mendorong kegiatan investasi dan untuk memperlancar penyaluran kredit perbankan melalui Paket Deregulasi Mei 1993. Paket kebijaksanaan 29 Mei 1993 yang menghapuskan sama sekali Daftar Negatif Investasi (DNI), sehingga para investor memiliki kebebasan dalam memilih lokasi, jenis dan volume investasi yang akan ditanamkan di Indonesia. Kebijakan ini kemudian diikuti dengan kebijaksanaan lain yang intinya untuk mendorong investasi, seperti penghapusan pagu kredit dan pembebasan penetapan suku bunga kredit investasi. Pengaruh langkah-langkah deregulasi sektor riil yang ditempuh Pemerintah dirasakan dampaknya pada kuartal IV 1993. Meskipun belum begitu menggembirakan, telah memperlihatkan sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan situasi tahun 1992. Pada tahun 1993 rencana PMDN yang disetujui Pemerintah mencapai Rp 39.450,4 miliar dan terus meningkat drastis menjadi Rp 100.715,2 miliar pada tahun 1996.

Pada tahun 1997 pengeluaran investasi baik dari pemerintah maupun swasta mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam. Melambatnya investasi Pemerintah berkaitan dengan penundaan dan penjadwalan kembali beberapa proyek pembangunan prasarana yang tidak mendesak. Sementara itu melemahnya kegiatan investasi swasta yang terlihat sejak semester II merupakan pencerminan kurang cerahnya kondisi dunia usaha. Krisis nilai tukar telah menyebabkan kenaikan biaya produksi dan beban kewajiban utang luar negeri yang sangat besar. Walaupun realisasi investasi mengalami penurunan, persetujuan investasi dalam rangka PMDN tetap mengalami peningkatan. Meningkatnya persetujuan PMDN berasal dari permohonan yang diajukan sebelum krisis.

Krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 belum pulih hingga tahun 1998. Stabilisasi dan pemulihan kegiatan ekonomi Indonesia relatif lebih lambat bila dibandingkan dengan negara-negara asia lainnya yang mengalami krisis. Hal ini berkaitan dengan kerusakan cukup dalam yang ditimbulkan oleh krisis yang terjadi di Indonesia pada sendi-sendi kehidupan perekonomian nasional. Pada paruh pertama tahun 1998 tekanan-tekanan kenaikan harga semakin tinggi disertai gejolak nilai tukar yang tajam. Bahaya hiper inflasi bahkan muncul ketika ingkaran depresiasi-inflasi bersama dengan ekspansi uang beredar yang naik pesat telah mengakibatkan laju inflasi melonjak tinggi. Akibatnya kegiatan produksi dan investasi di hampir seluruh sektor ekonomi menurun drastis. Penurunan investasi yang tajam terutama bersumber dari merosotnya investasi swasta. Secara sektoral, menurunnya persetujuan investasi terjadi pada sektor-sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDB, terutama industri pengolahan.

Selama tahun 2000 perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dengan pola pertumbuhan yang semakin seimbang. Kegiatan investasi yang pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi, pada tahun 2000 mulai mengalami peningkatan. Jumlah PMDN yang disetujui Pemerintah pada tahun 2000 mencapai Rp 92.327,7 miliar. Tetapi jumlah PMDN kembali mengalami penurunan menjadi Rp 58.674 miliar pada tahun 2001, dan menurun

lebih tajam menjadi Rp 252.262,3 miliar pada tahun 2002. Rendahnya kinerja investasi tersebut tidak lepas dari masih tingginya resiko investasi yang memperburuk daya saing perekonomian Indonesia terkait dengan berbagai masalah struktural yang masih ada. Dalam tahun 2003 perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik dan lebih stabil sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, laju inflasi dan suku bunga yang menurun tajam dan nilai tukar rupiah yang menguat dengan pergerakan yang relatif stabil. Keadaan ini membuat investasi kembali membaik. Hingga akhir tahun 2003 jumlah PMDN yang disetujui Pemerintah berjumlah Rp 48.484 miliar.

4.2. Analisis Data

Dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda serta menggunakan alat analisis SPSS versi 11.5 yang mengolah kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri sebagai variabel independent serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependent didapatkan beberapa hasil. Berdasarkan hasil olahan pada lampiran 2 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,918 - 4,503 X1 + 2,115 X2$$

$$R^2 = 0,295$$

Dimana : Y = pertumbuhan ekonomi

X1 = kredit perbankan

X2 = penanaman modal dalam negeri

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. nilai konstanta (B_0) positif sebesar 3,918 artinya bahwa apabila variabel kredit perbankan (X_1) dan penanaman modal dalam negeri (X_2) tetap atau konstan atau sama dengan nol maka terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,918 persen.
- b. nilai koefisien variabel kredit perbankan (X_1) negatif sebesar 4,503 yang berarti apabila terjadi peningkatan kredit perbankan sebesar 1 persen akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,503 persen.

- c. nilai koefisien variabel penanaman modal dalam negeri (X2) positif sebesar 2,115. Dengan koefisien sebesar itu dapat diartikan bahwa apabila penanaman modal dalam negeri mengalami perubahan sebesar 1 persen akan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,115 persen. Jadi apabila di Indonesia terdapat penambahan PMDN sebesar 1 persen maka akan mengakibatkan bertambahnya nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 2,115 persen. Demikian pula apabila di Indonesia terdapat pengurangan PMDN sebesar satu persen akan mengakibatkan berkurangnya nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 2,115 persen pula.

4.2.1. Uji Statistik

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas digunakan uji F dan uji t.

4.2.1.1. Uji Koefisien Serentak (F-test)

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas yaitu kredit perbankan (X1) dan penanaman modal dalam negeri (X2) secara serentak terhadap variabel tidak bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) digunakan uji F (F-test). Dari hasil analisa regresi diperoleh nilai probabilita F sebesar 0,000 menunjukkan bahwa probabilita F lebih kecil dari *level of significance* sebesar 0,05, yang berarti hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_a) diterima. Dengan diterimanya H_a dapat disimpulkan bahwa secara serentak variabel bebas kredit perbankan (X1) dan penanaman modal dalam negeri (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y) sebagai variabel tidak bebas.

4.2.1.2. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas (kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri) terhadap variabel tidak bebas (pertumbuhan ekonomi). Dari hasil analisa regresi masing-masing variabel bebas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. variabel bebas kredit perbankan (X1) memiliki nilai probabilita t sebesar 0,000, menunjukkan bahwa probabilita t lebih kecil dari *level of significance*

sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_a) diterima, sehingga variabel kredit perbankan (X_1) sebagai variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel tidak bebas yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y).

2. variabel bebas penanaman modal dalam negeri (X_2) memiliki nilai probabilita t sebesar 0,024, menunjukkan bahwa probabilita t lebih kecil dari *level of significance* sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_a) diterima, sehingga variabel penanaman modal dalam negeri (X_2) sebagai variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel tidak bebas yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y).

4.2.1.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas (independent) terhadap variasi naik turunnya variabel terikat (dependent). Hasil perhitungan dengan alat analisa SPSS diperoleh nilai R^2 sebesar 0,295. Hal ini berarti 29,5 % variasi naik turunnya variabel terikat mampu diterangkan oleh variabel bebas, sedangkan sisanya sebesar 0,715 atau 71,5 % merupakan sumbangan dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4.2.2. Uji Ekonometrika

4.2.2.1. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Pendeteksian adanya multikolinieritas dapat diketahui apabila VIF lebih besar dari 10 pada saat R square lebih dari 0,90 atau 90 % dan nilai TOL=1 (Aliman, 2000:27). Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh model yang dibuat dalam penelitian ini telah bebas dari multikolinieritas karena nilai VIF lebih kecil dari 10, yaitu sebesar 1,235 dan nilai TOL sebesar 0,809.

Disamping itu multikolinieritas dapat dideteksi dengan melakukan regresi sederhana antar variabel bebas dengan menjadikan salah satu variabel menjadi variabel tidak bebas (Arief, 1993:25). Dengan uji tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Nilai R^2 hasil regresi antar variabel bebas.

Var dependent	Var independent	Nilai R^2	Kesimpulan
Y	X1,X2	0,295	-
X1	X2	0,087	$r^2 < R^2$
X2	X1	0,087	$r^2 < R^2$

Sumber : lampiran 3

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa :

1. hasil regresi yang menjadikan variabel kredit perbankan (X1) sebagai variabel dependent dan PMDN (X2) sebagai variabel independent menghasilkan R square (r^2) sebesar 0,087 sedangkan R^2 hasil analisis regresi linier berganda sebesar 0,295. Sesuai dengan kriteria pengujian apabila r^2 regresi antar variabel dependent lebih kecil dari R^2 regresi linier berganda maka model tersebut terbebas dari multikolinieritas.
2. hasil regresi yang menjadikan variabel PMDN (X2) sebagai variabel dependent dan kredit perbankan (X1) sebagai variabel independent menghasilkan R square (r^2) sebesar 0,087 sedangkan R^2 hasil analisis regresi linier berganda sebesar 0,295. Sesuai dengan kriteria pengujian apabila r^2 regresi antar variabel dependent lebih kecil dari R^2 regresi linier berganda maka model tersebut terbebas dari multikolinieritas.

4.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan meregresi variabel bebas terhadap variabel residual. Suatu regresi dinyatakan terhadap gejala heteroskedastisitas apabila variabel bebasnya memiliki hubungan yang sempurna terhadap residual. Hasil analisis menunjukkan bahwa regresi variabel bebas terhadap residual tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh uji F dan uji t yang

tidak signifikan. Dengan demikian hasil regresi dalam penelitian ini telah terhindar dari penyakit heteroskedastisitas.

analisis

4.2.2.3. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, autokorelasi diuji dengan Durbin Watson test. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada lampiran 2 diketahui $dw = 0,483$. Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini sebanyak 64 dan variabel bebas (k) sebanyak dua buah, dengan tingkat keyakinan pada signifikan sebesar 5 % diperoleh d_l sebesar 1,54 dan d_u sebesar 1,66. Kriteria pengujian untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah sebagai berikut :

- Jika $d < d_l$, menolak H_0 (ada korelasi positif).
- Jika $d > 4 - d_u$, menolak H_0 (ada korelasi negatif).
- Jika $d_u < d < 4 - d_u$, terima H_0 (tidak ada korelasi).
- Jika $d_l < d < d_u$, pengujian tidak dapat disimpulkan.
- Jika $(4 - d_u) < d < (4 - d_l)$, pengujian tidak dapat disimpulkan.

Dari kriteria pengujian tersebut dapat diketahui bahwa hasil estimasi d sebesar 0,483 terletak pada daerah penerimaan $d < d_l$ yang berarti ada korelasi positif.

4.3. Pembahasan

Dari analisis regresi linier berganda didapatkan hasil uji t , uji F serta koefisien determinasi (R^2) yang bisa digunakan sebagai petunjuk mengetahui pengaruh kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1988.I-2003.IV baik secara parsial maupun secara serentak. Hasil uji F menunjukkan bahwa kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1988.I-2003.IV. Disamping itu koefisien R^2 sebesar 0,295 menunjukkan bahwa 29,5 % variasi naik turunnya variabel terikat (pertumbuhan ekonomi) mampu diterangkan oleh variabel bebas (kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri), sedangkan sisanya sebesar 71,5 % merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa kredit perbankan (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam analisis regresi linier berganda didapatkan nilai koefisien kredit perbankan negatif sebesar 4,503. Hal ini berarti apabila kredit perbankan mengalami kenaikan sebesar 1 persen akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,503 persen. Adanya hubungan negatif kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Kurniawan. Dalam penelitian Ade kurniawan didapatkan hasil kredit perbankan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa timur.

Lembaga perbankan dengan fasilitas kreditnya mempunyai pengaruh yang luas serta kompleks dalam bidang perekonomian. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang vital dalam kehidupan perekonomian terutama dalam fungsinya sebagai intermediasi atau penghubung dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang memerlukan dana. Apabila lembaga perbankan semakin giat dalam memberikan kredit kepada masyarakat untuk sektor riil maka akan terjadi peningkatan aktivitas pada sektor riil itu sendiri sehingga dalam tahapnya nanti akan meningkatkan produktivitas di sektor riil yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya apabila lembaga perbankan mengurangi atau mempersulit pencairan kreditnya untuk sektor riil maka sektor riil akan lamban dalam menjalankan aktivitasnya sehingga produktivitas yang dihasilkan kecil dan pertumbuhan ekonomi mengalami pergerakan yang lamban.

Fasilitas kredit yang diberikan perbankan secara teori memang akan dapat meningkatkan kegiatan pada sektor riil, tetapi di pihak lain pemberian kredit tidak selamanya mendukung kehidupan perekonomian. Pemberian kredit kepada masyarakat akan memberikan dampak yang positif apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, misalnya mengenai tingkat bunga, objek atau sasaran kredit dan berbagai kebijakan lain yang berhubungan dengan perkreditan. Pemberian kredit pada sektor-sektor yang kurang produktif tidak akan mempengaruhi produktivitas pada sektor tersebut dan hanya menambah beban hutang masyarakat pada sektor perbankan. Pemberian kredit yang tidak tepat pada sasaran akan membuat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat bertambah tinggi sehingga

memicu terjadinya inflasi. Inflasi yang bertambah cepat cenderung mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 1994:16).

Pengaruh negatif kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1988.I-2003.IV ternyata memang sesuai dengan kenyataan yang ada. Pengaruh negatif kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari berbagai paket deregulasi yang dikeluarkan Pemerintah. Tidak konsistennya antara satu paket dengan paket yang lain dan sering kali bertentangan atau terganggu oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro yang tidak bijaksana dan tidak konsisten dengan tujuan dari reformasi itu sendiri banyak menimbulkan masalah-masalah serius bagi sektor perbankan nasional. Seperti pada tahun 1988 ketika Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. Dengan diberlakukannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 telah membuat jumlah kantor bank umum berkembang dengan cepat. Di samping itu penurunan liquiditas wajib minimum dari 15% menjadi 2 % telah menyebabkan perbankan banyak melakukan ekspansi kredit, di mana proses penyaluran kredit tidak dilakukan secara profesional menurut prosedur bank yang sebenarnya, dan sangat dipengaruhi oleh KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Proses seleksi yang buruk ini selain karena lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia, juga diperparah oleh tekanan politik (campur tangan pemerintah dan tokoh berpengaruh) yang terlalu besar terutama dalam pengaturan pinjaman. Selain itu, akibat Pakto 1988 banyak bank baru muncul yang statusnya tidak berdiri sendiri melainkan merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan-perusahaan konglomerat, dan yang sejak awalnya hanya ingin mengambil dana dari nasabah untuk membiayai kelompok usahanya. Akibatnya sebagian besar dari dana investasi yang dimiliki bank-bank tersebut mengalir ke kegiatan-kegiatan ekonomi yang sebenarnya kurang produktif, atau yang prospek pasarnya tidak terlalu baik, atau ke sektor-sektor yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Kombinasi dari konsentrasi alokasi kredit yang sangat tinggi dan kecerobohan penyaluran dana atau pemberian kredit lebih banyak ke

kelompok atau relasi akhirnya menimbulkan kredit macet atau kredit bermasalah (*non performing loan*) yang menjadi salah satu persoalan serius yang dialami perbankan nasional hingga saat ini (Tambunan, 1998:195).

Krisis yang terjadi pada tahun 1997 juga telah menyebabkan kredit yang diberikan bank umum dalam valuta asing berdampak buruk pada dunia usaha. Nilai tukar rupiah yang tiba-tiba merosot tajam menyebabkan lonjakan pembayaran kewajiban utang bagi debitur (perusahaan). Berhubung sebagian besar kewajiban tersebut berjangka waktu pendek maka banyak debitur yang tidak mempunyai waktu cukup untuk mengembalikan kredit yang diberikan perbankan. Akibatnya banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Tahun 1996, jumlah kredit yang lancar sekitar 91,2 persen dari total kredit tahun itu. Ini merupakan suatu peningkatan sebesar 25,9 persen dari 89,6 persen tahun 1995. Pangsa kredit yang macet tahun 1996 sekitar 2,9 persen, sedikit menurun dari 3,3 persen dari tahun 1995. Tahun 1998, akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan jumlah kredit macet di Indonesia naik sangat pesat. Hingga Agustus 1998 diperkirakan Rp 320 triliun, atau hampir 49 persen dari total kredit yang disalurkan (Tambunan, 1998:197).

Variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa PMDN mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sesuai dengan analisis yang dilakukan koefisien regresi PMDN positif sebesar 2,115 yang berarti setiap penambahan PMDN di Indonesia sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 2,115 persen. Dilihat dari signifikansi pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi, PMDN mempunyai nilai probabilitas t sebesar 0,024 yang lebih kecil dari *level of significance* (0,05). Ini berarti PMDN mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini semakin memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akhmad Khaetami (1996) dimana PMDN mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan sektor industri.

Berkaitan dengan pengaruh nyata PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori. Penanaman modal atau investasi

merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Peranan investasi terhadap kapasitas produksi nasional memang sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian, baik untuk penambahan faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas faktor produksi.

Melihat peran penting investasi dalam perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Penanaman modal dalam negeri di Indonesia mulai bergairah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 Tentang PMDN. Perbaikan iklim investasi tak henti-hentinya dilakukan Pemerintah terutama sejak awal Pelita IV. Melalui berbagai paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan penyederhanaan mekanisme perijinan, penyederhanaan tata cara impor barang modal, pelunakan syarat-syarat investasi, serta merangsang investasi untuk sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu.

Pengaruh nyata penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada umumnya membutuhkan sumber dana pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Pengaruh yang besar ini menunjukkan bahwa permodalan memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan pandangan kaum Klasik yang menyatakan bahwa pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu dari pada pembagian kerja. Pemupukan modal merupakan suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Stok kapital yang diikuti oleh penambahan tenaga kerja akan meningkatkan output total. Disamping itu makin besar stok kapital akan memperbesar kemungkinan dilaksanakannya spesialisasi yang selanjutnya akan semakin meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

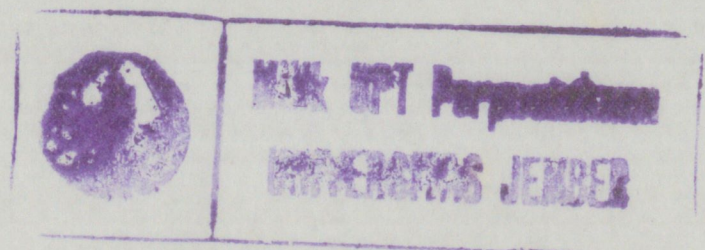
Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. variabel kredit perbankan dan penanaman modal dalam negeri baik secara parsial maupun serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988.I – 2003.IV.
2. variabel kredit perbankan secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988.I – 2003.IV. Dari hasil analisis didapatkan nilai koefisien kredit perbankan negatif sebesar 4,503. Sedangkan variabel penanaman modal dalam negeri secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988.I – 2003.IV. Dari hasil analisis didapatkan nilai koefisien penanaman modal dalam negeri positif sebesar 2,115.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dirumuskan maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak perbankan dalam memberikan kredit perbankan harus selektif dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran dana pembangunan dan kredit macet. Pemberian kredit yang tidak tepat sasaran akan menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat sehingga memicu terjadinya inflasi.
2. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, sehingga memungkinkan perkembangan realisasi investasi khususnya investasi dalam negeri. Hal ini bisa didukung dengan mengoptimalkan implementasi dari berbagai deregulasi agar proses perijinan semakin lancar dan peningkatan fasilitas dan kualitas infrastruktur yang lebih merata di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Soelistyo. 1982. *Pengantar Ekonometri I*. Yogyakarta: BPFE UGM

Aliman. 2000. *Modul Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta: PAU UGM.

Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta : UI Press

Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan..* Yogyakarta : STIE YKPN

Bank Indonesia. *Statistik dan Keuangan Indonesia*. Beberapa Edisi.

Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE UGM

Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES

Dumairi. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta:Erlangga.

Insukindro. 1993. *Ekonomi Uang dan Bank : Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta:BPFE UGM

Jhingan, ML. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Kamaluddin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI

Khaetami, A. 1996. *Pengaruh Kredit Perbankan dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Nilai Produksi Sektor Industri Di Propinsi DKI Jakarta Tahun 1990 - 1994*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Jember : Fakultas Ekonomi UNEJ

Kurniawan, Ade. 2002. *Pengaruh Kredit Perbankan dan Investasi Asing Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Tahun 1994-2001*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Jember : Fakultas Ekonomi UNEJ.

Nopirin. 1994. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta:BPFE UGM

Sarwedi. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jember : Lab Perbankan Fakultas Ekonomi UNEJ.

- Soelistyo.1982. *Pengantar Ekonometri I*. Yogyakarta:BPFE UGM
- Soeyono. 1991. *Manfaat Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) Terhadap Pedagang Kecil Di Pedesaan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember*. Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan). Jember. Fakultas Ekonomi UNEJ.
- Sukirno, Sadono. 1998. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sumantoro.1990.*Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*.Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Suparmoko, Irawan. 1995. *Ekonomi Pembangunan*.Yogyakarta:Liberty.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problematika dan Pendekatan*. Jakarta:Salemba Empat
- Susilo, Sri. Trandaru, Sigit. A Totok Budi Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suyatno, Thomas. 1999. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tambunan, Tulus. 1998. *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI.

Lampiran 1a. Data Base

	tahun	kredit	pmdn	pe
1	1988.I	35081,00	3399,70	5,62
2	1988.II	38202,00	3619,20	5,89
3	1988.III	41513,00	3838,70	6,15
4	1988.IV	44001,00	4058,20	6,41
5	1989.I	46526,00	4459,90	6,85
6	1989.II	51662,00	4752,30	7,26
7	1989.III	57382,00	5044,70	7,65
8	1989.IV	63606,00	5337,00	8,04
9	1990.I	71564,00	11192,90	7,32
10	1990.II	82334,00	13710,70	7,27
11	1990.III	91036,00	16228,50	7,22
12	1990.IV	97696,00	18746,30	7,17
13	1991.I	99689,00	12033,10	7,05
14	1991.II	104526,00	10588,50	6,98
15	1991.III	103950,00	9683,90	6,92
16	1991.IV	112825,00	8509,30	6,85
17	1992.I	115739,00	8436,30	6,64
18	1992.II	118044,00	7702,40	6,52
19	1992.III	121919,00	6968,50	6,40
20	1992.IV	122918,00	6234,50	6,29
21	1993.I	124167,00	5618,25	2,30
22	1993.II	134649,00	6998,35	1,90
23	1993.III	141969,00	9860,86	4,00
24	1993.IV	147349,00	16923,84	-1,60
25	1994.I	154879,00	16668,13	9,01
26	1994.II	167447,00	12524,41	10,72
27	1994.III	175268,00	14351,90	6,91
28	1994.IV	188880,00	9742,19	3,92
29	1995.I	196149,00	16357,08	8,13
30	1995.II	207762,00	12900,37	7,34
31	1995.III	220859,00	22616,13	7,85
32	1995.IV	234611,00	17996,42	9,55
33	1996.I	242423,00	33982,47	5,74
34	1996.II	260755,00	30258,62	6,67
35	1996.III	273395,00	23843,10	8,41
36	1996.IV	292921,00	12415,20	10,28
37	1997.I	306125,00	38599,60	7,55
38	1997.II	328808,00	28114,70	5,20
39	1997.III	368517,00	28491,50	5,30
40	1997.IV	378134,00	24549,70	1,08

Lampiran 1b. Data Distribusi

	tahun	kredit	pmdn	pe
41	1998.I	476841,00	18980,60	-4,49
42	1998.II	626465,00	10896,80	-13,34
43	1998.III	535975,00	25210,20	-16,00
44	1998.IV	487426,00	5660,90	-18,26
45	1999.I	366543,00	9592,20	-6,00
46	1999.II	251262,00	9550,60	1,79
47	1999.III	263262,00	30361,20	2,85
48	1999.IV	225133,00	6096,30	5,36
49	2000.I	223235,00	7610,60	4,10
50	2000.II	240135,00	3891,30	5,14
51	2000.III	248994,00	12054,35	4,05
52	2000.IV	269000,00	64738,45	6,41
53	2001.I	285375,00	8094,80	4,02
54	2001.II	306333,00	31694,00	4,20
55	2001.III	304428,00	10954,40	3,85
56	2001.IV	307594,00	7930,80	1,71
57	2002.I	302776,00	3495,50	2,67
58	2002.II	312018,00	9438,80	3,87
59	2002.III	341172,00	5866,80	4,25
60	2002.IV	365410,00	6461,20	3,82
61	2003.I	376141,00	3616,30	4,45
62	2003.II	390563,00	6110,50	3,65
63	2003.III	411696,00	6477,90	3,97
64	2003.IV	437942,00	32280,10	4,35

Lampiran 1b. Data Diestimasi

	tahun	pe	lkredit	lpmdn
1	1988.I	5,62	10,47	8,13
2	1988.II	5,89	10,55	8,19
3	1988.III	6,15	10,63	8,25
4	1988.IV	6,41	10,69	8,31
5	1989.I	6,85	10,75	8,40
6	1989.II	7,26	10,85	8,47
7	1989.III	7,65	10,96	8,53
8	1989.IV	8,04	11,06	8,58
9	1990.I	7,32	11,18	9,32
10	1990.II	7,27	11,32	9,53
11	1990.III	7,22	11,42	9,69
12	1990.IV	7,17	11,49	9,84
13	1991.I	7,05	11,51	9,40
14	1991.II	6,98	11,56	9,27
15	1991.III	6,92	11,55	9,18
16	1991.IV	6,85	11,63	9,05
17	1992.I	6,64	11,66	9,04
18	1992.II	6,52	11,68	8,95
19	1992.III	6,40	11,71	8,85
20	1992.IV	6,29	11,72	8,74
21	1993.I	2,30	11,73	8,63
22	1993.II	1,90	11,81	8,85
23	1993.III	4,00	11,86	9,20
24	1993.IV	-1,60	11,90	9,74
25	1994.I	9,01	11,95	9,72
26	1994.II	10,72	12,03	9,44
27	1994.III	6,91	12,07	9,57
28	1994.IV	3,92	12,15	9,18
29	1995.I	8,13	12,19	9,70
30	1995.II	7,34	12,24	9,47
31	1995.III	7,85	12,31	10,03
32	1995.IV	9,55	12,37	9,80
33	1996.I	5,74	12,40	10,43
34	1996.II	6,67	12,47	10,32
35	1996.III	8,41	12,52	10,08
36	1996.IV	10,28	12,59	9,43
37	1997.I	7,55	12,63	10,56
38	1997.II	5,20	12,70	10,24
39	1997.III	5,30	12,82	10,26
40	1997.IV	1,08	12,84	10,11

Lampiran 2
Regression

	tahun	pe	lkredit	lpmdn
41	1998.I	-4,49	13,07	9,85
42	1998.II	-13,34	13,35	9,30
43	1998.III	-16,00	13,19	10,14
44	1998.IV	-18,26	13,10	8,64
45	1999.I	-6,00	12,81	9,17
46	1999.II	1,79	12,43	9,16
47	1999.III	2,85	12,48	10,32
48	1999.IV	5,36	12,32	8,72
49	2000.I	4,10	12,32	8,94
50	2000.II	5,14	12,39	8,27
51	2000.III	4,05	12,43	9,40
52	2000.IV	6,41	12,50	11,08
53	2001.I	4,02	12,56	9,00
54	2001.II	4,20	12,63	10,36
55	2001.III	3,85	12,63	9,30
56	2001.IV	1,71	12,64	8,98
57	2002.I	2,67	12,62	8,16
58	2002.II	3,87	12,65	9,15
59	2002.III	4,25	12,74	8,68
60	2002.IV	3,82	12,81	8,77
61	2003.I	4,45	12,84	8,19
62	2003.II	3,65	12,88	8,72
63	2003.III	3,97	12,93	8,78
64	2003.IV	4,35	12,99	10,38

Lampiran 2 Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LPMDN, LKREDIT ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PE

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543 ^a	.295	.272	4.60814	.483

a. Predictors: (Constant), LPMDN, LKREDIT

b. Dependent Variable: PE

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	541.977	2	270.988	12.761	.000 ^a
	Residual	1295.330	61	21.235		
	Total	1837.306	63			

a. Predictors: (Constant), LPMDN, LKREDIT

b. Dependent Variable: PE

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.918	10.448		3.750	.000
	LKREDIT	-4.503	.891	-.604	-5.051	.000
	LPMDN	2.115	.917	.276	2.307	.024

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	LKREDIT	-.483	-.543	-.543	.809	1.235
	LPMDN	.012	.283	.248	.809	1.235

a. Dependent Variable: PE

Coefficient Correlations^a

Model			LPMDN	LKREDIT
1	Correlations	LPMDN	1.000	-.436
		LKREDIT	-.436	1.000
	Covariances	LPMDN	.841	-.357
		LKREDIT	-.357	.795

a. Dependent Variable: PE

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	LKREDIT	LPMDN
1	1	2.995	1.000	.00	.00	.00
	2	.003	31.312	.22	.11	.99
	3	.002	41.448	.78	.89	.01

a. Dependent Variable: PE

Casewise Diagnostics^a

Case Number	TAHUN	Std. Residual	PE
43	1998.III	-3.737	-16.00
44	1998.IV	-3.635	-18.26

a. Dependent Variable: PE

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-1.5099	9.2600	4.2684	2.93305	64
Residual	-17.2223	7.8357	.0000	4.53440	64
Std. Predicted Value	-1.970	1.702	.000	1.000	64
Std. Residual	-3.737	1.700	.000	.984	64

a. Dependent Variable: PE

Lampiran 3a

Uji Multikolinieritas

Kredit sebagai dependent variabel

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PMDN ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KREDIT

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,296 ^a	,087	,073	130859,32126

a. Predictors: (Constant), PMDN

b. Dependent Variable: KREDIT

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,02E+11	1	1,0166E+11	5,936	,018 ^a
	Residual	1,06E+12	62	17124161961		
	Total	1,16E+12	63			

a. Predictors: (Constant), PMDN

b. Dependent Variable: KREDIT

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	176742,64	26290,550		6,723	,000
	PMDN	3,629	1,489	,296	2,436	,018

a. Dependent Variable: KREDIT

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	189079,78	411671,34	226890,61	40169,40896	64
Residual	-153998,8	410179,06	,0000	129816,60089	64
Std. Predicted Value	-,941	4,600	,000	1,000	64
Std. Residual	-1,177	3,135	,000	,992	64

a. Dependent Variable: KREDIT